

**SKEMA PENELITIAN UTAMA**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**



**KEBIJAKAN STRATEGIS NEGARA DI BIDANG MEDIA DAN PRAKTIK  
JURNALISTIK DI ERA PANDEMIK COVID-19**

Peneliti

Ketua : Dudi Iskandar (120020)

Anggota : Geri Suratno (150043)

**UNIVERSITAS BUDI LUHUR, JAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Riset** : **Kebijakan Strategis Negara di Bidang Media dan Praktik Jurnalistik di Era Pandemi Covid-19**

Ketua Periset  
Nama Lengkap : Dr. Dudi Iskandar, S.Ag, M.I.Kom  
NIDN : 0305037208  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Nomor Hp : 08151664340 dan 081388143580  
Alamat email : dudi.iskandar@budiluhur.ac.id

Nama Lengkap : Geri Suratno  
NIDN : 0311108409  
Perguruan Tinggi : Universitas Budi Luhur, Jakarta  
Prodi : Ilmu Komunikasi

Usulan Anggaran : Rp15 Juta (Lima belas juta rupiah)

Jakarta, 3 Juli 2022

Mengetahui  
Ketua Pusat Studi Komunikasi



**Dr. Dudi Iskandar, S.Ag, M.I.Kom**  
NIDN : 0305037208

Ketua Periset

**Dr. Dudi Iskandar, S.Ag, M.I.Kom**  
NIDN : 0305037208

Menyetujui  
Direktur Riset dan PPM  
Universitas Budi Luhur

**Dr. Krisna Adiyarta**  
NIDN : 0305076701

## DAFTAR ISI

1. HALAMAN SAMPUL/ <i>COVER</i>	
2. HALAMAN PENGESAHAN	
3. DAFTAR ISI	
4. RINGKASAN/ <i>ABSTRACT</i>	1
5. PRAKATA	2
6. BAB I PENDAHULUAN	3
7. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
8. BAB III METODE PENELITIAN	15
9. BAB IV HASIL DAN ANALISA	17
10. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
11. DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR LAMPIRAN	
1. REALISASI BIAYA	
2. INSTRUMEN PENELITIAN	
3. BIODATA PENELITI	
4. SURAT PERJANJIAN KONTRAK	
5. CATATAN HARIAN	
6. ARTIKEL ILMIAH	
7. HKI	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Media yang berhenti di masa pandemik Covid-19	2
Tabel 2 Media yang mengurangi jumlah wartawan dan karyawan di masa pandemik Covid-19	3
Tabel 3 Struktur Kepemilikan Media di Indonesia	8

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Sebaran Jumlah Wartawan dan Produksi Berita per Provinsi	19
Gambar 2 Journalist Place of Works	20
Gambar 3 Pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku	21

## RINGKASAN/ABSTRACT

Pandemi covid-19 menyebabkan krisis di semua aspek kehidupan, termasuk pada ranah media dan jurnalisme. Banyak media yang mati karena kesulitan biaya operasional. Pun, tidak sedikit wartawan yang kehilangan pekerjaannya. Fakta inilah yang menjadi dasar pemerintah melalui Dewan Pers-Satgas Penanganan Covid-19 menggulirkan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pola, menganalisis aktivitas, dan memprediksi hubungan antara media dan negara pasca-Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus tipe tunggal holistik. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memotret konteks yang dinamis. Sedangkan studi kasus adalah metode untuk merekam sebuah peristiwa yang memiliki ukuran ruang dan waktu tertentu. Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku dilaksanakan Agustus-Desember 2021 yang melibatkan 7.276 wartawan dari 857 media (cetak, televisi, radio, dan daring) dan 26 kurator. Jumlah berita yang berhasil diproduksi sebanyak 288 607 buah. Jumlah berita itu terdiri dari 59.375 berita televisi, 7.314 berita radio, 140.493 berita media daring, dan 80.455 berita media cetak. Penelitian ini menemukan selama Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku jurnalisme mengalami krisis, kehilangan fungsinya sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Pemberian uang tunai kepada wartawan dan kurator selama fellowship menjadikan jurnalisme kehilangan independensinya. Untuk merevitalisasi fungsi pers, pasca pandemi covid-19, jurnalisme dan media harus melepaskan diri dari kekuasaan, konglomerasi, dan kepentingan politik sesaat. Hanya dengan inilah jurnalisme berada di nilai kesejatiaannya dan kokoh sebagai penyuaranya kepentingan publik.

**Keywords :** *jurnalisme krisis; krisis jurnalisme; pandemi covid-19; fellowship jurnalisme perubahan perilaku*

## **PRAKATA**

Allah Swt, Tuhan kami, terima kasih kekuatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa menyelesaikan karya ini. Tanpa kekuasaan dan kemampuan dari-Mu, apalah daya kami untuk merampungkan penelitian ini.

Muhammad Rasulullah Saw, untukmu solawat dan salam kami. Berkat kehadiranmu kami bisa membaca kalam ilahi dan alam semesta. Karena bimbingan engkaulah, Sang Nabi Agung, kami mampu berbagi rasa dan pengetahuan tentang penelitian ini.

Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Ketua Harian Yayasan Universitas Budi Luhur Bapak Kasih Anggoro, MBA, Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Wendi Usino, M.Si, MM, Direktur DRPM Dr, Krisna Adiyarta dan seluruh stafnya serta semua rekan dosen, dan nara sumber penelitian ini.

Tentu saja orang-orang terdekat kami, keluarga dan sanak saudara tidak mungkin dilupakan. Berkat doa dan dorongan mereka penelitian ini selesai. Kepada mereka, kami haturkan terima kasih yang tak terhingga; dari dunia hingga akhirat.

Jakarta, Juni 2022

Peneliti

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Media mengalami beberapa kali krisis, baik yang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, (Julia Cage, 2016); Eugenia Siapara, 2012); Jack Fuller (2010); Martin Hirst (2011); Wilson Lawrey and Peter J. Gade, 2011) atau yang disebabkan kondisi ekonomi negara yang sedang goyah sendi-sendi ekonominya. Firdaus Cahyadi (2011).

Kini krisis media dipicu pandemik covid-19. Kantor berita nasional Australia; The Australian Associated Press (AAP) telah memberhentikan 170 jurnalis pada 26 Juni 2020, dan menutup layanan produksi editorialnya, pagemaster pada akhir Agustus 2020. AAP mulai diterbitkan pada tahun 1935 oleh penerbit surat kabar Keith Murdoch, ayah dari pendiri News Corp, Rupert Murdoch. AAP dimiliki oleh organisasi berita Australia: Australia News Corp, Nine Entertainment Co., Seven West Media, dan Australian Community Media.<sup>1</sup> Sementara itu, koran Inggris terkemuka The Guardian memotong jumlah karyawan sebanyak 180 orang. Hal yang sama dilakukan oleh BBC yang mengurangi jumlah karyawan dan wartawan yang mencapai 450 orang.<sup>2</sup>

Media di Indonesia pun tidak lepas dari hantaman krisis yang dipicu pandemik covid-19 (Wisnu Prasetya Utomo, 2020); (Gilang Hesti Parahita (2020). Pandemik covid-19 menghantam semua aspek media. Pandemik covid-19 menyebabkan kehidupan media di ambang kehancuran. Semua aspek ekonomi media seperti pembayaran gaji wartawan, pembelian kertas khusus media cetak, pembayaran pajak, dan sebagainya terganggu. Kini media di ambang kebangkrutan.

#### **Tabel**

##### **Media yang berhenti di masa pandemik Covid-19**

---

<sup>1</sup> <http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/2244>. Diakses pada 17 Februari 2021

<sup>2</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200716165843-4-173319/efek-pandemi-corona-the-guardian-bbc-phk-ratusan-karyawan>. Diakses pada 17 Februari 2021

No	Nama Media	Jenis Media	Area Sirkulasi	Mulai tidak terbit
1	Koran Tempo	Koran	Seluruh Indonesia	1 Januari 2021
2	Indo Pos	Koran	Seluruh Indonesia	30 Desember 2020
3	Suara Pembaruan	Koran	Seluruh Indonesia	1 Februari 2021
4	Indopos.com	Situs berita (Online)		30 Desember 2020

Tabel Koran Yang Mengurangi Jumlah Halaman di Era Pandemi Covid-19<sup>3</sup>

No	Nama Koran	Jumlah Pengurangan Halaman
1	The Jakarta Post	Dari 12 halaman ke 8 halaman
2	Republika	Dari 24 halaman ke 16 halaman
3	Rakyat Merdeka	Dari 20 halaman ke 16 halaman
4	Kompas	Dari 24 halaman ke 16 halaman
5	Bisnis Indonesia	Dari 24 halaman ke 20 halaman

Hasil Survei AJI-IFJ<sup>4</sup> menemukan di 38 kota dan jejaring media sosial menemukan sejumlah fakta, antara lain, sebanyak 83.5 persen responden terdampak perekonomiannya akibat pandemi, sedangkan 16.5 persen responden lainnya tidak. Dampak tersebut meliputi, pengurangan honor (53.9 persen), pemotongan gaji (24.7 persen), Pemutusan Hubungan Kerja (5.9 persen), perumahan karyawan (4.1 persen), dan lain-lainnya.

<sup>3</sup> Diolah dari Nasihin Masha, 2020. *Jungkir Balik Pers; Masa Depan pers dalam Pergumulan Internet of Things dan Konglomerasi Bisnis Media*, Jakarta. Republika, 33-34

<sup>4</sup> [https://aji.or.id/upload/article\\_doc/Riset\\_IFJ.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Riset_IFJ.pdf). Diakses pada 12 Februari 2021



Ancaman PHK Ancaman hilangnya pekerjaan para pekerja media melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan sangat serius. Sebab, 74.9 persen responden menyatakan di perusahaannya tidak ada wadah serikat pekerja. Hanya 25.1 persen responden yang mengatakan di perusahaannya ada serikat pekerja.

Kesimpulan riset itu adalah pandemi covid-19 berdampak serius terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan para pekerja media, antara lain pengurangan honor (53.9 persen), pemotongan gaji (24.7 persen), PHK (5.9 persen), perumahan karyawan (4.1 persen), dan lain-lainnya, maka penguatan serikat pekerja sangat mendesak dan penting direalisasikan. Apalagi, khusus dalam persoalan sengketa ketenagakerjaan, tidak banyak organisasi wartawan yang memiliki divisi/bidang khusus untuk mengurus kasus-kasus ketenagakerjaan.

Tabel 2

Media yang mengurangi jumlah wartawan dan karyawan di masa pandemik Covid-19

No	Nama Media	Jenis Media	
1	Koran Tempo	Koran	Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)/pensiun dini
2	Indo Pos	Koran dan Online	Pensiun
3	Suara Pembaruan	Koran	Pensiun dini
4	The Jakarta Post	Koran	Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)/pensiun dini
5	Kumparan.com	Online	PHK
6	Jawa Pos	Koran dan Online	Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)/pensiun dini

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi ini, beberapa asosiasi media dan wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi

Media dan dimotori Dewan Pers<sup>5</sup> mengajukan tujuh permintaan kepada pemerintah.

1. Mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.
2. Mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.
3. Mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei - Desember 2020.
4. Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.
5. Mendorong negara menanggihkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

---

<sup>5</sup>[https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Skema\\_Insentif\\_Ekonomi\\_untuk\\_Industri\\_Media\\_rev-ljh.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Skema_Insentif_Ekonomi_untuk_Industri_Media_rev-ljh.pdf). Diakses pada 17 Februari 2021

Merespon permintaan Dewan Pers dan pengelola media tersebut, pemerintah berjanji memberikan sejumlah insentif bagi industri pers atau media. Ada tujuh poin kesepakatan terkait insentif dalam pertemuan tersebut. Pertama, pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam peraturan menteri keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.

Kedua, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media. Ketiga, pemerintah akan menanggukkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat keputusan presiden (keppres).

Keempat, pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media. Kelima, pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

Keenam, pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan. Ketujuh, pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media lokal.<sup>6</sup>

Mendapat permintaan tersebut, negara/pemerintah merespon dengan salah satunya mengadakan kegiatan bernama Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19.<sup>7</sup> Kegiatan ini dilaksanakan Mei-Desember 2021. Artinya, kegiatan ini sampai sekarang masing berlangsung.

Fellowship ini memiliki tiga tujuan. Yaitu,

1. Menjadikan jurnalis sebagai garda depan perubahan masyarakat guna mencegah penularan covid-19

---

<sup>6</sup> <https://republika.co.id/berita/qhbkwi380/dewan-pers-insentif-bagi-media-secepatnya-disalurkan>. Diakses pada 17 Februari 2021

<sup>7</sup> [https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers\\_detail/527/Dewan\\_Pers\\_Apresiasi\\_Fellowship\\_Jurnalisme\\_Perubahan\\_Perilaku](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/527/Dewan_Pers_Apresiasi_Fellowship_Jurnalisme_Perubahan_Perilaku). Terakhir diakses 20 Agustus 2021 pukul 07.44 Wb

2. Menciptakan pemberitaan yang mentaati kode etik jurnalistik tentang perkembangan pandemik covid-19
3. Turut memberikan solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan.

Wartawan yang mengikuti kegiatan ini memperoleh dana penggantian transportasi Rp.1.600.000 per orang setiap bulannya selama delapan bulan

Selama delapan bulan, wartawan yang terlibat memiliki tanggung jawab moral, antara lain

1. Peserta wajib menaati Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS dan melakukan kegiatan peliputan dengan mengindahkan sopan santun dan kepatutan (misalnya tidak mengintimidasi narasumber, tidak menggunakan program ini untuk tujuan-tujuan lain).
2. Peserta wajib memberi teladan pelaksanaan Protokol Kesehatan (3M) selama melakukan peliputan dan dalam kegiatan sehari-hari.

Sedangkan tanggung jawab profesional, wartawan yang mendaftar sebagai peserta harus

1. Menaati Kode Etik Jurnalistik & P3SPS
2. Menulis minimal 11 berita (hardnews) per-bulan.
3. Menulis minimal 1 feature/liputan mendalam per-bulan.
4. Berita dimuat di media masing-masing dan dikirimkan ke kanal berita khusus untuk Program ini
5. Mengupload berita di akun media sosial masing-masing

Sesungguhnya permintaan insentif ekonomi (salah satunya dengan kegiatan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku) kepada negara merupakan sesuatu yang dilematis dan problematis. Di satu sisi, media dan negara harus vis a vis. Media harus mengawasi jalannya negara. Media sebagai *watchdog*. Namun, pada sisi yang berlainan, kondisi pandemik covid-19 memaksa media menjalankan politik akomodatif karena kesulitan ekonomi. Dengan demikian,

selama dan pasca-pandemik covid-19 hubungan media, negara, dan masyarakat di Indonesia berubah secara drastis dan dramatis.

Penelitian ini mencoba merekonstruksi hubungan media, negara, politisi, dan masyarakat di tengah dan pasca-pandemik covid-19. Bahwa pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku di era pandemik covid-19? Bagaimana makna Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku bagi praktisi di era pandemik covid-19 sebagai pilar demokrasi? Bagaimana hubungan negara dan media pasca Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian tentang hubungan negara, politik, dan media di Indonesia sudah dilakukan Firdaus Cahyadi (2011), David T. Hill dan Khrisna Sen (2000), Aliansi Jurnalis Independen (2009), Yanuar Nugroho (2012), dan Marlyna Lim (2012), Ross Tapsell (2018). Khusus perubahan media dalam konteks bisnis secara makro tulisan Amelia Arsenault dan Manuel Castells (2008) relevan untuk dijadikan referensi.

Mungkin sudah menjadi sesuatu yang klasik perdebatan antara hubungan media dan negara. Namun, dalam konteks, permintaan kepada negara untuk membantu industri media, wartawan, pekerja media yang terdampak krisis pandemik covid-19, menjadi relevan untuk diapungkan kembali.

Sekitar abad 17-19-an, media (pers) sangat digdaya. Ia tidak peduli dengan urusan dunia di luar dirinya. Media adalah media. Media berfungsi mengawasi semuanya, termasuk negara. Media mengawasi perjalanan dan pelaksanaan negara dengan nama watchdog. Bahkan, saking jemawanya, bukan hanya mengawasi tetapi media sanggup berhadapan (*vis a vis*) atau menantang beragam gagasan yang dilontarkan oleh negara. Dari kebebasan, netralitas, dan independensi inilah lahirnya istilah yang sangat agung buat media, *the fourt estate of democracy* (sebagai pilar keempat demokrasi). (Kovach and Rosentiels, 2010)

Seiring waktu berjalan, melalui kekuatan kapitalisme, kekuasaan, dan ideologi, negara muncul menjadi satu-satunya kekuatan yang tidak bisa dilawan, termasuk oleh media. Plus perkembangan teknologi komunikasi yang sangat hegemonik, membuat kekuasaan negara dengan sangat kuat mencengkram media, termasuk kini saat pandemik covid-19.

Dalam konteks hari ini, semua yang dilakukan media meminta bantuan negara bukan sebuah tindakan yang salah. Sebab kini di dunia yang serba-terhubung' ketika realitas luar biasa kompleks, dan relasi yang teramat rumit di antara semua realitas, tidak ada lagi realitas (termasuk media) yang bisa berdiri sendiri (independen). Semuanya interdedepensi; media tidak lagi bersikap netral/imparsial (tidak memihak/tidak berada dalam satu posisi tertentu/tanpa

tone). Semua realitas berpihak atau melekat pada posisi tertentu, termasuk keberpihakan politik media; semua media tidak bisa polos dengan bersembunyi di balik kata objektif. Semuanya subjektif. Bahkan, ultra-subjektif dalam memilih data dan fakta sebagai bahan baku berita.

Tidak ada yang salah dengan sikap media terhadap negara tersebut. Ini hanya persoalan ruang dan waktu; permasalahan konteks. Akan salah jika kondisi permintaan media ini disampaikan pada abad 17-19-an silam. Sebaliknya, justru akan menumbuhkan persoalan tersendiri jika media tidak melakukan permintaan itu. Akan banyak perusahaan media yang tutup, kualitas informasi menurun karena wartawan kurang konsentrasi akibat memikirkan kondisi ekonomi keluarga, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sesungguhnya permintaan tolong media kepada negara sesungguhnya bukan barang baru di negara ini. Ketika rezim Orde Baru, banyak media yang meminta tolong agar tidak dibrendel. Ada juga yang meminta diizinkan kembali terbit. (Atmakusuma, 1999). Alasannya sama (namun konteksnya berbeda), ancaman pengangguran, keberlangsungan informasi, dan sebagainya. Publik tidak tahu di belakang permohonan itu, ada kesepakatan di belakang meja, hidden agenda tertentu, kepentingan sesaat atau bahkan kongkalikong antara negara dan media.

### **Struktur Kepemilikan Media di Indonesia<sup>88</sup>**

No	Pemilik Media	Nama (Grup) Media
1	Jacob Oetama	Kompas Grup (Koran Kompas, Koran Tribun Kompas TV, kompas.com, tribunnews.com, dan sebagainya)
2	Surya Paloh	Media Grup (Koran Media Indonesia, Koran

<sup>88</sup> Bandingkan dengan Merlyna Lim yang mencatat 13 kelompok yang menguasai media di Indonesia [https://www.academia.edu/7282028/Lim\\_M\\_2012\\_The\\_League\\_of\\_Thirteen\\_Media\\_Concentration\\_in\\_Indonesia?auto=download](https://www.academia.edu/7282028/Lim_M_2012_The_League_of_Thirteen_Media_Concentration_in_Indonesia?auto=download). Bandingkan juga dengan hasil penelitian Yanuar Nugroho dkk <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Industri-Media-2012.pdf>

		Lampung Post, Metro TV, medcom dan sebagainya
3	Hary Tanoesoedibjo	MNC Grup (RCTI, Global TV, MNC TV, Koran Sindo, okezone.com, dan sebagainya
4	Chairul Tanjung	Detik.com, Trans tv, trans-7, detik.com
5	Emtek	Indosiar dan SCTV
6	Erick Tohir	Koran Republika, republika.co.id, Alif TV
7	James Riady	Lippo Grup (e-paper suarapembaruan, beritasatu.com)
8	Aburizal Bakrie	TV One, ANTV, Vivanews.co.id dan sebagainya
9	Jawa Pos	Koran Jawa Pos, Koran Radar di 38 kota, jawapos.com Jawa Pos TV, dan sebagainya

Tabel  
Aliansi dan atau Kecenderungan Keterkaitan Pemilik Media dan Politik di  
Indonesia

No	Pemilik Media	Nama (Grup) Media
1	Jacob Oetama	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2	Surya Paloh	Partai Nasdem
3	Hary Tanoesoedibjo	Partai Perindo
4	Chairul Tanjung	Partai Demokrat (Tergabung dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyon-Boediono)
5	Emtek	
6	Erick Tohir	Tergabung dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin
7	James Riady	
8	Aburizal Bakrie	Partai Golkar
9	Jawa Pos	Koalisi Partai Demokrat



Survei Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)<sup>9</sup> menunjukkan dalam konteks Indonesia media bukan hanya sebagai lembaga sosial dan ekonomi/bisnis. Ia sebagai lembaga politik dan kini menjadi salah satu aktor dan komunikator politik. Dengan demikian, hasil survei tersebut sebagai rekonstruksi dari tiga komunikator politik versi Dan Nimmo (1989), yaitu, politisi, aktivis, dan profesional sekaligus memperkuat teori Brain McNair (1995).

Pengusaha media di Indonesia bukan berasal dari wartawan yang idealis. Bahkan mayoritas berlatar belakang pebisnis. Mereka melihat informasi tak lebih dari suatu komoditas yang diperjualbelikan dengan mengabaikan nilai sosial, budaya, atau politik dari informasi tersebut (Ignatius Haryanto. 2014). Para pengusaha media bukan orang sabar dalam berinvestasi jangka panjang tetapi mencari keuntungan secepatnya dengan dekat kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan dekat dengan sumber keuangan. Dekat kekuasaan politik perlu memiliki dalam bentuk kekuasaan lain. Media masalah yang menjadi alatnya. Media bukan ranah yang netral sebab di dalamnya beragam kepentingan kelompok bertarung. Media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebar ke khalayak.

Konglomerasi media kian hegemonik dan menemukan momentumnya seiring dengan ideologi kapitalisme masuk ke dunia jurnalisme. Menurut Yasraf Amir Piliang (2011), ada empat unsur utama kapitalisme global, yakni, waktu, ruang, uang, dan kecepatan. Percepatan dan kecepatan ini sudah merusak dan merasuk ke semua aspek kehidupan manusia, termasuk jurnalisme. Kecepatan dan percepatan menyeret jurnalisme ke dalam pusaran kompetisi global. Di sinilah lidah api kapitalisme membakar nilai agung jurnalisme. Berita sebagai unsur atau pilar pokok atau inti dari jurnalisme menjadi komoditas (Danny Schechter. 2007). Dengan menjadi komoditas berita kehilangan elan vitalnya. Ia hanya sebagai alat untuk menghasilkan keuangan. Berita bukan lagi sebagai pemproduksi wacana yang mencerahkan; pembangun kesadaran masyarakat.

---

<sup>9 9</sup> <http://pindai.org/2014/12/03/media-sebagai-aktor-politik>.

Dalam konteks percepatan produksi berita sesungguhnya profesi wartawan merupakan profesi yang terjajah; profesi tidak memiliki pencerahan kecuali bekerja, bekerja dan bekerja; profesi mekanistik; mesin yang harus terus berproduksi karena tuntutan pemodal. Tidak penting wartawan menghasilkan tulisan bagus; memproduksi analisis mendalam kalau tidak laku dijual. Berita buruk atau berita pesanan pun jadi yang terpenting laku dijual; menghasilkan laba; perusahaan untung. Berita terjerembab menjadi pendiktean oleh kekuatan modal, hasilnya adalah manipulasi informasi untuk kepentingan masing-masing kelompok. Bukan hanya memberi keuntungan finansial tetapi juga ia memiliki agenda terselubung (Ignatius Haryanto. 2014).

Konglomerasi menyebabkan keseragaman pesan yang disampaikan. Keseragaman merampas hak publik untuk mendapatkan informasi yang beragam. Media massa yang seharusnya menjadi ruang publik (Jurgen Habermas. 2010) berubah menjadi milik sekelompok orang melalui teknik representasi.

Ada tujuh kritik terhadap konglomerasi media. 1) Terjadi konsentrasi kepemilikan media oleh segelintir orang. 2) Banyak pemilik media yang memiliki kepentingan selain media. 3) Konglomerasi media menyebabkan penguasaan informasi pada segelintir orang. 4) Pemberitaan cenderung mengarah ke populisme, infotainment, dan hiburan. 5) Redefinisi audiens sebagai konsumen bukan warga. 6) Akses yang tidak setara terhadap isi media dan teknologi media. 7) Kekuatan ekonomi politik personal yang menguasai kerajaan media (Eoin Devereux, 2003).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia sebagai makhluk bebas, independen, dan kreatif yang bisa menciptakan realitas sendiri. Ia bisa menentukan diri sendiri. Dari kebebasan dan kreativitas inilah makna/pemaknaan sebagai inti dari kualitatif timbul.

Dalam sejarahnya, penelitian kualitatif menghasilkan dua pendekatan, yaitu, penelitian interpretif/konstruktivis dan kritis. Model interpretif/konstruktivis adalah yang pertama dari pendekatan penelitian kualitatif. Asumsi dasarnya adalah manusia mampu menciptakan realitas mandiri.

Ada lima karakter khas dalam penelitian kualitatif. Yakni, kajian berfokus pada makna kehidupan yang berada di bawah permukaan atau tidak terlihat, sebagai representasi (menghadirkan kembali) pandangan atau perspektif masyarakat, berlatar belakang kontekstual, memberikan peluang munculnya konsep baru yang bisa menjelaskan tentang perilaku manusia, dan berusaha untuk menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh kebenaran atau kepercayaan (Robert K. Yin, 2011: 7).

Pendekatan ini digunakan untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Makanya penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui proses berpikir induktif (model penalaran khusus ke umum). (Basrowi dan Sukidin. 2002:2). Ia bertentangan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan logika deduktif (model penalaran dari umum ke khusus).

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus tipe tunggal holistik. Pengertian studi kasus penelitian yang dilakukan kepada suatu objek yang dinamakan kasus. Yang dipandang sebagai sebuah satu kesatuan yang dibatasi pada ruang dan waktu tertentu. Penelitian studi kasus mengungkap secara utuh dan menyeluruh sebuah kasus yang terjadi. Kunci dari penelitian studi kasus

adalah pertanyaan tentang *why* (kenapa) dan *how* (bagaimana) terjadinya satu kasus yang diteliti (Robert K. Yin. 2003)

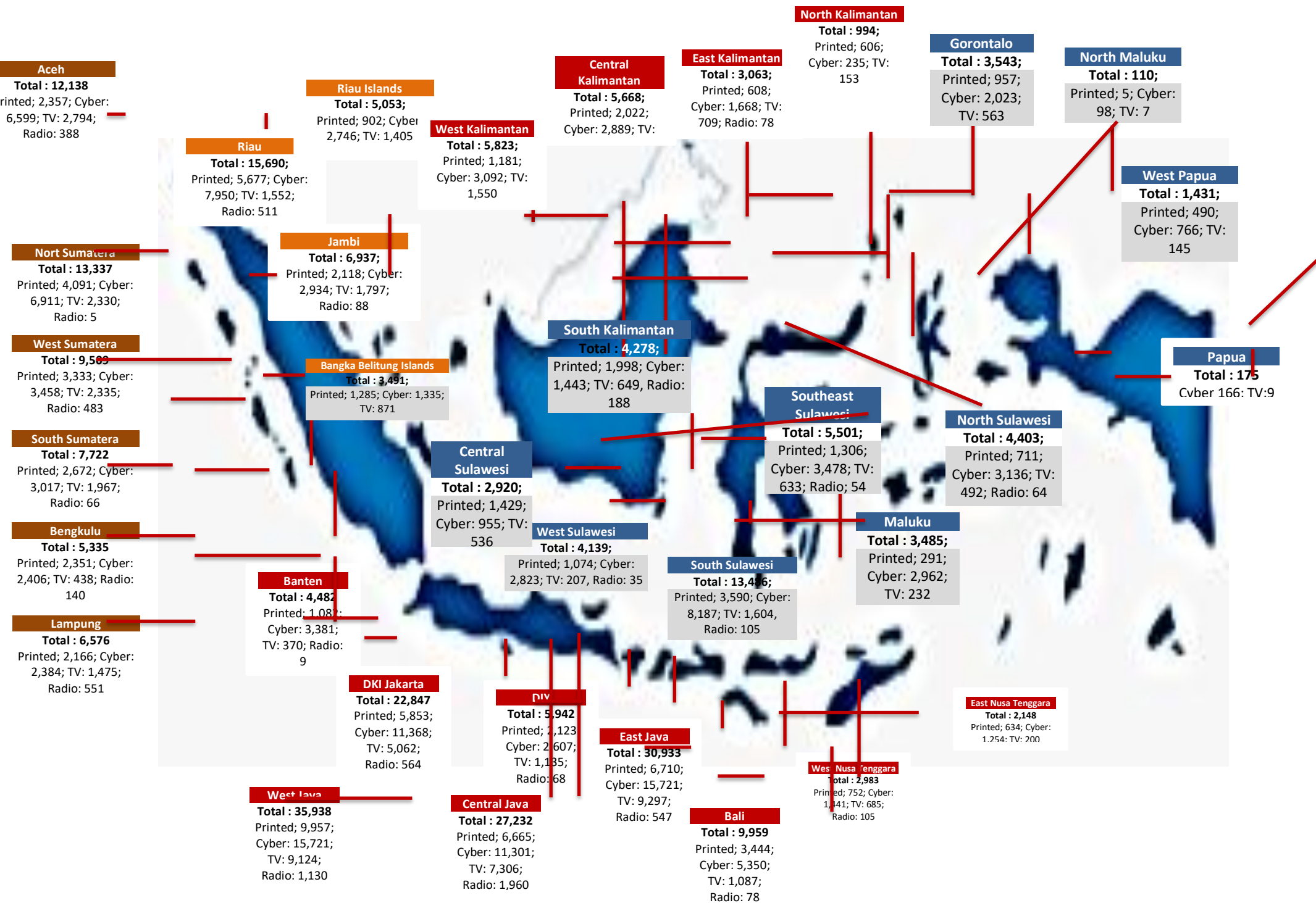
Metode penelitian studi kasus tunggal holistik ini dipakai jika yang diteliti hanya satu unit analisis. Unit analisis menurut Arikunto (2010: 187) merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti.

Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah hanya satu atau tunggal, yakni, Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Pers Dan Satgas Penanganan Covid-19.

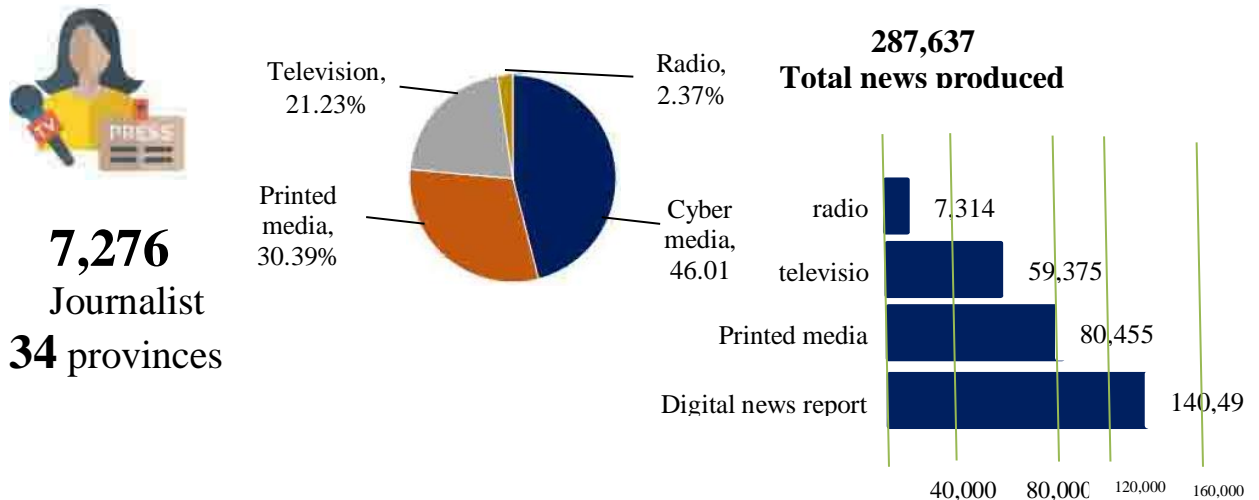
**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**OUTPUT OF JURNALISM FELLOWSHIP PROGRAM ACROSS**  
**INDONESIA**

Media merambah 34 provinsi di seluruh Indonesia di mana Jawa Barat memiliki jumlah berita/artikel tertinggi (35.938), diikuti oleh Jawa Timur (30.933), Jawa Tengah (27.232), DKI Jakarta (22.847), dan Riau (15.690). . Rata-rata jumlah artikel berita yang diterbitkan setiap hari adalah 480 berita di media cetak, 832 berita dalam bentuk digital, 431 berita yang ditayangkan di televisi, dan 50 berita yang disebarluaskan melalui radio. Program ini mencakup 857 perusahaan media massa di Indonesia.

**Gambar 1**  
**Sebaran Jumlah Wartawan dan Produksi Berita per Provinsi**



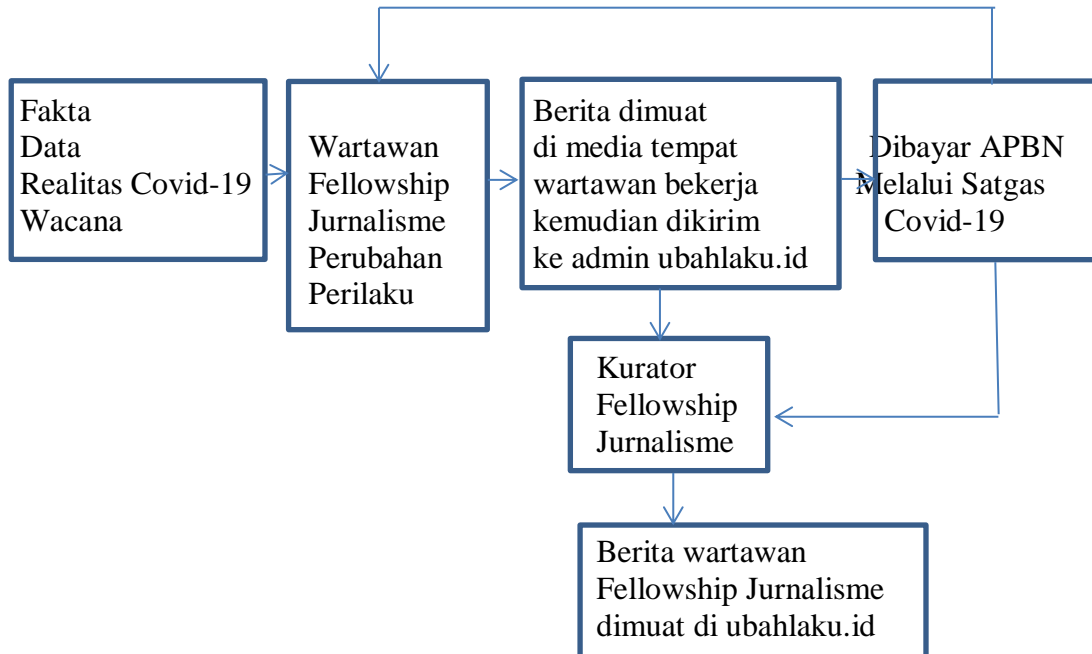
**Gambar 2**  
**Journalist Place of Works**



Sebanyak 7.276 jurnalis dari berbagai media di 34 provinsi mengikuti program fellowship. Mayoritas jurnalis berasal dari media siber (46,01%), disusul media cetak (30,39%), televisi (21,23%), dan radio (2,36%). Selama 5 bulan terakhir, total 288.607 berita telah dihasilkan, antara lain 59.375 berita yang dimuat di televisi, 7.314 berita melalui radio, 140.493 berita digital, dan 80.455 berita dalam bentuk media cetak.

Secara singkat pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan Dewan Pers-Satgas Penanganan Covid-19 ini bisa digambarkan seperti di bawah ini :

**Gambar 3**  
**Pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku**



**Contoh Berita Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (1)<sup>10</sup>**

**Tim RST Dr Latumeten Lakukan Vaksinasi Covid di Batabual Namlea,**

Tim kesehatan dari Rumah Sakit Tentara (RST) Dr Latumeten Ambon, melakukan kegiatan vaksinasi Covid 19 kepada masyarakat Desa Ilath, Kec.Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Pasiter Kodim 1506/Namlea, Kapten Inf A Haris Tumenggung Senin (3/1/2022) menjelaskan, kegiatan vaksinasi kepada masyarakat Ilath itu bagian dari kegiatan serbuan vaksinasi Covid 19 oleh Kodam XVI-Pattimura di wilayah kerja Kodim 1506/Namlea.

<sup>10</sup> diambil melalui tautan <https://ubahlaku.id/news/suara-maluku-papua>. Diakses terakhir pada 13 Januari 2022 pukul 08.33 wib



Mengutip laporan Babinsa Desa Ilath, Sertu Dharman Wabula dari Koramil 1506-01/Namlea yang ditugasi komandan turut memonitoring kegiatan vaksinasi melaporkan ada sebanyak 66 warga yang divaksin yang dilakukan bertepatan dengan hari terakhir tutup tahun 2021 lalu (31/12/2021).

### **Contoh berita Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (2)<sup>11</sup>**

#### **Satu Warga Asal Katingan Hilir Terkonfirmasi Positif Covid-19**

KALAMANTHANA, Kasongan – Kasus Covid-19 di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali terdeteksi. Satu warga dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Sekretaris Satgas Covid-19 Katingan, Roby mengatakan, sesuai dengan laporan Satgas Covid-19 terdeteksi satu warga Katingan yang tertular dan dinyatakan terkonfirmasi positif. “Warga yang terinfeksi Covid-19 berasal dari Katingan Hilir,” ujarnya.

Dalam kurun tiga bulan terakhir di Kabupaten Katingan, kasus positif Covid-19 tidak muncul dan belum ditemukan. Maka, kasus baru ini merupakan kasus pertama setelah beberapa bulan terakhir.

Roby yang juga sehari-hari sebagai Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Katingan mengingatkan

---

<sup>11</sup> diambil melalui tautan <https://ubahlaku.id/news/kabar-kalimantan>. Untuk akses berita bisa diklik melalui <https://www.kalamanthana.id/2022/01/05/satu-warga-asal-katingan-hilir-terkonfirmasi-positif-covid-19/> Diakses terakhir pada 13 Januari 2022 pukul 08.03 wib

masyarakat diwilayahnya supaya mentaati protokol kesehatan. Apalagi ketika melaksanakan aktivitas yang cukup padat.

” Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Katingan siaga dalam penanganan wabah pandemi yang melanda secara global. Dengan melaksanakan penertiban penggunaan masker dan kerumunan masyarakat ditempat-tempat publik,” ujarnya. Warga yang terpapar Covid-19 ini mengalami perawatan dan menjalani isolasi dirumah. Penanganan bagi pasien yang positif akan ditempatkan di RSUD Mas Amsyar dan Hotel Katingan. (Sun Rise)

### **Contoh berita Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (3)<sup>12</sup>**

#### **Vaksinasi Anak Usia 6 -11 Tahun Dimulai Besok**

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dijadwalkan akan memulai kegiatan vaksinasi 11 tahun secara serentak pada Selasa 11 Januari 2022, besok mulai – 16.00 WIT. Juru bicara Satgas Covid-19 yang juga Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Kota Ambon, Joy Adriaansz kepada tim Media Center, Senin, menjelaskan Vaksinasi akan dilaksanakan pada posko – posko yang pada sejumlah sekolah, untuk melayani para siswa dari satuan yang berada di wilayah sekitarnya.

Dirinya mencontohkan, untuk Posko Vaksinasi SD Negeri 68 Silale, nantinya tidak hanya melayani siswa di sekolah tersebut, namun juga melayani vaksinasi terhadap siswa pada SD Inpres 19, SD Negeri 69 Silale, dan SD Negeri 30

---

<sup>12</sup> diambil melalui tautan <https://ubahlaku.id/news/suara-maluku-papua> Untuk akses berita bisa diklik melalui <https://www.orasirakyat.com/2022/01/vaksinasi-anak-usia-6-11-tahun-dimulai.html>. Diakses terakhir pada 13 Januari 2022 pukul 08.10 wib

“Vaksinasi ditempatkan pada sekolah tertentu, yang nantinya tidak hanya melayani siswa di sekolah tersebut, namun juga siswa dari sekolah lainnya yang ada di wilayah dalam cakupan layanan Puskesmas dan rumah sakit terdekat,” kata Jubir.

### **Problematika dan Dilema Fellowship**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penelusuran di lapangan tentang Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini, peneliti menemukan beberapa hal yang menarik. Yaitu :

Pertama, kualitas berita yang dihasilkan sangat rendah. Ini sangat berbeda dengan berita yang dihasilkan media mainstream. Produksi berita peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku hanya seputar memberitakan saja. Misalnya, kepala desa atau camat mengkampanyekan pemakaian masker Atau pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa menganjurkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak) di daerah tempat wartawan bekerja. Kualitas pemberitaan hanya sebatas itu. Tidak ada standar baku tentang kualitas berita yang diproduksi. Hal ini bisa dimengerti karena wartawan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku hanya disyaratkan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) level muda<sup>13</sup> yang diselenggarakan Dewan Pers yang bekerja sama dengan organisasi kewartawanan.

---

<sup>13</sup> Ada tiga level Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers bersama organisasi kewartawanan. Yakni, level muda, madya, dan utama.

Problem kualitas berita ini pun diakui Dewan Pers sebagai penyelenggara Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Salah seorang anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan dengan mengetahui kualitas berita di Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini, maka Dewan Pers mendapat gambaran secara utuh tentang kualitas wartawan dalam menghasilkan secara utuh.

“Ini salah satu pelajaran terpenting dari Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku,” ujar Agus. “Ini akan menjadi evaluasi dan masukan berharga bagi Dewan Pers untuk terus meningkatkan kualitas wartawan pasca Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini.”

Kelemahan kualitas berita ini pun disadari oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Wakil Sekretaris PWI Pusat, Suprpto, menyatakan salah satu alasan munculnya kualitas berita yang rendah disebabkan seleksi peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang kurang ketat. Peserta hanya dipersyaratkan sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan level muda. Artinya, baru wartawan pemula yang dari sudut pengalaman masih minim.

“(Kualitas rendah) ini bisa dimengerti karena Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini bertujuan hanya untuk menyebarkan atau kampanye protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi kualitas berita tidak diutamakan. Yang terpenting informasi tentang protokol kesehatan secepatnya tersebar,” jelas Suprpto.

Menurut Suprpto, ketika menghadapi pandemi covid-19 pemerintah (melalui Satgas Covid-19) menginginkan masyarakat mendapat informasi yang benar tentang pandemi covid-19. Sebab, banyak hoaks dan fake news yang

berkembang di masyarakat, baik melalui jejaring dan media sosial ataupun situs berita yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers.<sup>14</sup>

Keinginan pemerintah untuk memberikan informasi yang benar tentang pandemi covid-19 ini, menurut Agus, karena ingin segera memberikan dan menyelesaikan informasi pandemi covid-19 yang benar berdasarkan keilmuan. “Jika 50 persen informasi tentang pandemi covid-19 yang disampaikan media kepada masyarakat benar berdasarkan keilmuan, maka penanganan masalah pandemi ini setengahnya sudah selesai,” tambah Agus.

Kedua, pengetahuan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tentang teori dan praktik jurnalistik sangat minim. Bahkan untuk pengetahuan tentang konstruksi 5W + 1H saja tidak tahu. Apalagi jika ditanya tentang etika jurnalisme yang sangat filosofis. Dipastikan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak mengetahuinya. Ini menjadi problem mendasar karena jurnalisme memiliki dua sisi yang saling mengisi, yakni teknik dan etik.

“Pengetahuan tentang jurnalisme tidak hanya diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga praktik di lapangan. Tidak semua wartawan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku berlatar belakang akademik komunikasi atau jurnalisme. Banyak wartawan yang yang tidak mengetahui jurnalisme secara teoritis. Mereka langsung terjun ke dunia jurnalisme tanpa pengetahuan yang memadai tentang jurnalisme,” papar salah seorang kurator, Dhimam Abror.

Minimnya level pemahaman tentang teori jurnalisme, menurut Agus Sudibyo, akan menjadi pekerjaan rumah Dewan Pers pasca Fellowship Jurnalisme

---

<sup>14</sup> Salah satu tugas Dewan Pers adalah memverifikasi (baik formal maupun material/faktual) media di Indonesia.

Perubahan Perilaku. Ke depan tantangan Dewan Pers harus terus menggelorakan dan meningkatkan pengetahuan wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan.

“Dewan Pers beserta semua pemangku kepentingan jurnalisme di Indonesia tentu akan mengevaluasi semua pelaksanaan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Kekurangan dan kelebihan akan menjadi bahan masukan dan program kerja Dewan Pers di masa mendatang,” jelas Agus Sudibyo.

Kekurangan ini pun disadari PWI. Dalam pandangan Suprpto, pelaksanaan rekrutmen peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku memang terkesan buru-buru karena memberikan informasi yang benar tentang pandemi covid-19 tidak bisa ditunda, karena semakin lama, informasi yang tidak benar tentang covid-19 kian luas beredar. “Media bertanggung jawab untuk segera meluruskan hal ini,” tegas Suprpto.

Ketiga, terdapat gradasi peran media sebagai watchdog dan the fourth estate of democracy. Harus diakui para peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tak mungkin menghasilkan berita investigasi yang merupakan ciri khas media sebagai watchdog dan the fourth estate of democracy. Berita yang diproduksi hanya sekedar memenuhi kewajiban sehingga mendapat bayaran penuh sebesar Rp1,6 juta untuk wartawan dan Rp3.000.000 untuk kurator per bulan. Di sisi lain, tidak mungkin peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku kritis terhadap kebijakan pemerintah yang sudah membayarnya melalui dana APBN. Apalagi untuk menghasilkan sebuah berita investigasi membutuhkan usaha yang keras, pengetahuan yang mendalam, dan waktu yang lama.

“Sejak awal AJI menolak program ini. AJI mengingatkan tentang kemungkinan munculnya conflict of interest pada peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini,” kata mantan Ketua Umum AJI, Abdul Manan.

Konflik kepentingan ini muncul karena Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku berada dalam dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, wartawan/media harus mengawasi jalannya kekuasaan (pemerintah/negara), tetapi di sisi yang berlawanan, kekuasaan memberikan uang untuk biaya liputan dan pemberitaan yang dipakai untuk mengawasinya.

AJI mengakui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah sebuah dilema. Karena kondisi luar biasa yang melanda dunia media dan jurnalisme ketika pandemi covid-19, AJI tidak bisa melarang anggotanya untuk tidak mengikuti Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini. AJI hanya bisa menghimbau anggotanya tidak menerima. Karena hanya himbauan bukan larangan, banyak anggota AJI yang mengikuti Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Padahal kalau kondisi normal, AJI pasti sudah mengeluarkan anggota yang menerima uang langsung dari negara.

“AJI mengharamkan uang langsung dari APBN,” kata Ketua Umum AJI, Sasmito Madrim. “Kalau kerja sama dengan lembaga negara, AJI tidak pernah berurusan dengan uangnya. AJI hanya konsentrasi pada programnya.”

Menurut Sasmito, bantuan melalui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini dikhawatirkan menghilangkan daya kritis wartawan. Keharusan atau tekanan untuk memuat berita (melalui rilis) akan menghilangkan independensi wartawan. Padahal independensi adalah nilai jurnalisme yang tidak bisa ditawar.

Independensi atau bebas dari tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan adalah nyawa jurnalisme untuk tetap menjadi watchdog dan pilar keempat demokrasi.

Sasmito menyadari kondisi sulit media dan wartawan ketika pandemi covid-19. Oleh sebab itu, AJI memberi bantuan untuk wartawan yang terdampak pandemi covid-19. Bentuk bantuan itu bisa bantuan langsung (tunai) atau melalui fellowship. Sumber dana AJI berasal dari kas organisasi, dana sosial, dan bantuan dari forum wartawan teknologi (hasil kerja sama dengan berbagai institusi). AJI sangat hati-hati dan memverifikasi secara ketat organisasi yang memberikan bantuan. Kerja sama dengan lembaga negara atau institusi memiliki dua batasan. Pertama, sepanjang tidak melanggar kode etik dan kode perilaku organisasi.<sup>15</sup> Kedua, tidak mempengaruhi independensi pemberitaan.

“Uang APBN adalah dana negara. Uang negara adalah uang publik juga. Bukan sesuatu yang haram bagi media untuk menerima bantuan dari negara. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini,” tegas Agus Sudibyo.

Abdul Manan setuju dengan pendapat Agus Sudibyo tentang dana negara untuk wartawan dan media. Hanya saja Abdul Manan memberi garis tegas dan jelas tentang negara dan pemerintah.

“Yang harus dicatat adalah uang yang diberikan pemerintah sebagai kewajiban negara mengayomi warga negaranya, terutama di masa sulit seperti ini. Bukan berarti yang diberikan pemerintah kepada wartawan dan media dijadikan alat untuk meredam sikap kritis wartawan dan media. Sebaliknya, wartawan dan

---

<sup>15</sup> Selengkapnya bisa dilihat di AD/ART AJI. [https://aji.or.id/upload/Dokumen/AD%20%26%20ART%20AJI%202021-2-26\\_.pdf](https://aji.or.id/upload/Dokumen/AD%20%26%20ART%20AJI%202021-2-26_.pdf). Diakses terakhir 30 November 2021 pukul 07.10 wib



media pun jangan menjadikan bantuan sebagai beban untuk tidak mengkritik kekuasaan,” kata Abdul Manan.

Abdul Manan meneruskan bahwa uang dan fasilitas yang diberikan pemerintah bukan untuk membungkam wartawan dan media selama pandemi covid-19. Wartawan dan media harus tetap independen dari kekuasaan. Wartawan tetap harus mengutamakan objektivitas ketika membuat berita. Meski kondisi pandemi dan krisis, check and balance terhadap kekuasaan tetap harus berlangsung antara wartawan/media dan pemerintah/negara.

“Sejak awal penyelenggaraan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini permintaan Dewan Pers kepada pemerintah adalah tidak boleh ada syarat wartawan atau media tidak boleh mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Silakan saja tulis secara kritis selama sesuai dengan fakta di lapangan,” tandas Agus Sudibyo.

Keempat, motivasi untuk memperoleh insentif finansial. Seperti tujuan awal Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku untuk membantu wartawan yang kesulitan finansial selama pandemi covid-19, maka peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku pun hanya mengejar target 11 berita per bulan seperti yang sudah ditentukan. Tidak ada keinginan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku memproduksi berita yang secara kuantitas melebihi yang ditargetkan.

Selain AJI yang menghadapi dilema ketika pandemi covid-19, media di daerah dan wartawan di lapangan pun mengalami hal yang sama (Chelin Indra Sushmita dkk, 2021) . Hanya saja dilemanya berbeda. Yaitu, perusahaan tidak menggajinya dengan layak (minimal dengan Upah Minimum Provinsi/UMP) dan

keharusan tetap bertahan di tengah pandemi covid-19. Mengikuti Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku merupakan jalan keluarnya. Mendapat tambahan Rp1,6 juta per bulan adalah berkah yang tak terhingga. Rp1.600.000 juta per bulan merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran wartawan dan media yang berada di daerah.

“Penolakan amplop atau uang transport liputan seperti pada Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak memperhatikan kondisi media dan wartawan di daerah. Mungkin kalau di Ibu Kota dan media besar, uang transport bukan sesuatu yang penting. Tetapi bagi media dan wartawan di daerah, jelas sangat membantu,” kata Mohammad Hakim, salah satu wartawan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku asal Surabaya.

Mohammad Hakim melanjutkan seharusnya yang menolak bantuan negara dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku melihat kondisi media dan wartawan yang ada di daerah-daerah. Bertahan dalam kondisi normal saja sangat sulit apalagi ketika dihantam pandemi covid-19. Perusahaan harus mengeluarkan biaya operasional dan gaji wartawan sedangkan pemasukan dari iklan menurun drastis. Jumlah media yang kian menjamur (khususnya media online), menjadikan kue iklan semakin mengecil. Di tengah persaingan yang kian sengit, media kecil di daerah harus berdarah-darah untuk bertahan dan sekadar hidup.

“Makanya saya berharap fellowship semacam ini terus diadakan oleh Dewan Pers sebagai fasilitator dan pelindung pers. Selesai Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku, Dewan pers mengadakan fellowship lain seperti tentang hak azasi manusia, perlindungan kekerasan seksual, kebebasan pers, dan sebagainya ”

ujarnya. “Dengan fellowship minimal bisa meringankan beban perusahaan untuk menggaji wartawan. Dengan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku wartawan mendapat tambahan penghasilan.”

Hakim mengakui bahwa bersikap kritis terhadap negara tetap harus diusung media, sebab fungsi media sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi. Tetapi sikap kritis bukan berarti tidak boleh menerima uang dari negara. Bersikap kritis kepada negara/pemerintah tidak selalu dalam konteks pandemi covid-19. Masih banyak aspek dan kebijakan negara yang harus dikritisi media/wartawan.

“Saya banyak menulis berita kritis kepada negara/pemerintah di luar masalah pandemi covid-19. Banyak berita kritis yang disetorkan ke ubahlaku.id, tetapi tidak dimuat,” tambahnya.<sup>16</sup> “Tetapi kita juga tahu dirilah karena menerima dana dari negara. Tidak mungkin semua tulisan kita mengkritik kebijakan mereka.”

## **A. PEMBAHASAN**

### **Dari Jurnalisme Krisis ke Krisis Jurnalisme**

Seperti disebutkan pada hasil penelitian, Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan Dewan Pers dan Satgas Pananganan Covid-19 merupakan sebagai salah satu bentuk jurnalisme krisis; jurnalisme yang diselenggarakan ketika krisis (saat pandemi covid-19). Yang terpenting pada jurnalisme krisis ini adalah data, fakta, dan informasi atau wacana tentang pandemi covid-19 disampaikan wartawan kepada masyarakat. Jurnalisme yang

---

<sup>16</sup>ubahlaku.id adalah situs penampungan dan penyebaran semua berita yang dikirim wartawan yang mengikuti fellowship jurnalisme perubahan perilaku

dikembangkan mirip kampanye atau semacam promosi program pemerintah dalam menangani covid-19. Pemerintah sangat berkepentingan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang pandemi covid-19 versinya. Itulah alasan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku digulirkan. Tentu saja membantu keuangan wartawan adalah tujuan awal yang tidak boleh dilupakan.

Jadi jurnalisme krisis tidak berbicara tentang independensi, imparialitas, objektivitas, dan cover both (all) sides. Yang utama adalah informasi tentang pandemi covid-19 yang benar secepatnya sampai ke masyarakat. Padahal kecepatan merupakan musuh jurnalisme (Matilda Fahlen, 2016); Bill Kovach dan Tom Rosentiels. 2010). Tujuan utama Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah melawan hoaks, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi tentang pandemi covid-19 yang banyak beredar dan tersebar terutama melalui media sosial (Iswandi Syahputra dkk, 2021) dan media massa abal-abal atau tidak jelas. (Ali Salman, 2021); (Gil Baptista Ferreira and Susana Borges, 2020).

Berita yang diproduksi wartawan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku cenderung “statement news,” terutama pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat publik di pusat maupun di daerah. Wartawan sering kali tidak memperluas penggalan data, fakta, dan konteks lebih mendalam. Mayoritas nara sumber utama adalah penguasa, pejabat, dan dari level atas hingga level terbawah.

Dalam jurnalisme krisis pandemi covid-19, jejak langkah dan gerak wartawan terbatas karena menghindari kerumuman. Wartawan harus menghindari kontak fisik langsung dengan nara sumber sehingga jurnalisme kehilangan elan vitalnya. Jurnalisme kesulitan mencari dan menemukan nara sumber kompeten di

luar lingkaran kekuasaan (Jan Michael Alexandre C Bernadas, 2020); Mildred F. Perreault and Gregory P. Perreault, 2021). Akhirnya wartawan menjadikan pemerintah sebagai nara sumber tunggal. Lembaga resmi seperti Satgas Penanganan Covid-19 menjadi sumber utama dan satu-satunya, baik melalui konferensi pers ataupun pers release.

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (seperti aplikasi zoom, googlemeet dan lain-lain) yang digunakan wartawan bukanlah jalan keluar, sebab dalam jurnalisme pengamatan lapangan atau partisipan merupakan teknik reportase terbaik untuk memproduksi jurnalisme berkualitas (Luwi Ishara, 2011). Pandemi covid-19 menyebabkan berita hanyalah sebuah talking news atau statement news dari institusi resmi pemerintah sehingga jurnalisme kehilangan elan vitalnya sebagai penyampai suara publik (Bill Kovach and Tom Rosentiel, 2007).

Singkat kata dalam jurnalisme krisis Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku kualitas berita yang dihasilkan rendah. Ia mengejar dan mendahulukan kuantitas daripada kualitas berita. Pengetahuan wartawan tentang teknik dan etik minim karena tidak dilakukan seleksi dengan ketat, sekadar lulus uji Kompetensi Wartawan tingkat terendah. Sementara itu, kurator berita pun tidak bisa berbuat banyak karena kelebihan beban untuk menilai ratusan berita setiap bulannya. Tidak ada metode yang pasti untuk mengoreksi dan menilai berita yang disetorkan wartawan. Yang terpenting bagi wartawan adalah jumlah berita yang ditargetkan terpenuhi. Begitu juga bagi kurator yang terpenting adalah pekerjaannya tidak terbengkalai.

Satgas Penanganan Covid-19 adalah public relations pemerintah. Jurnalisme yang diproduksi peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak lebih hanyalah pers release. Layaknya pers release, karya jurnalistik Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku bersifat monoton, searah, dan monopoli kebenaran. Berita yang dihasilkan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah konstruksi public relation pemerintah.

Di sisi lain, pandemi covid-19 pun mengisyaratkan krisis lain, yakni, krisis jurnalisme. Krisis jurnalisme yang dipicu kehadiran teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet, menghasilkan kuantitas berita yang sangat melimpah bahkan over-produksi (Bill Kovach and Tom Rosentiels. 2010), maka krisis jurnalisme yang muncul karena pandemi covid-19 pun mengisyaratkan kualitas jurnalisme menurun secara drastis.

Sebelumnya jurnalisme dihantam krisis akibat penurunan pemasukan iklan, migrasi dari media tradisional ke digital, kehadiran media sosial, keterlibatan elite politik-kekuasaan, perubahan audiens (John V. Pavlik, 2021); (Pauline Gidget Estella, 2020). Krisis jurnalisme diidentifikasi dengan lima indikator. Yaitu, jatuhnya sirkulasi, jatuhnya pendapatan advertising, difusi perhatian, krisis yang berwenang, dan ketidakmampuan atau keengganan jurnalisme mempertanyakan struktur kekuasaan semua berkontribusi untuk membawa krisis yang mendalam jurnalisme. Krisis jurnalisme didiagnosis meliputi serangkaian masalah, yaitu, yang berkaitan dengan waktu, uang, otonomi, dan perubahan budaya (Eugenia Siapera, 2012).

Tidak ada lagi tuntutan wartawan untuk untuk melaksanakan tugas suci, seperti memeriksa silang (cross check) dengan dua atau tiga sumber independen, mengecek sensitivitas informasi, mencari ketersediaan sumber alternatif, serta keandalan sumber asli. Padahal jika misi suci jurnalisme diabaikan tak hanya soal opini publik yang melenceng, tetapi kredibilitas media yang bersangkutan pun dipertaruhkan. Karena media terlalu manja hanya menunggupress release yang akan disampaikan juru bicara pemerintah (Thulani Tshabangu and Abiodun Salawu, 2021). Dengan demikian dalam jurnalisme krisis tidak ada pembicaraan tentang kualitas berita. Padahal seharusnya dalam masa pandemi covid-19, kualitas jurnalisme berlandaskan kepakaran bukan statement resmi pemerintah (Racquel Garcia Agustin and Jaime Zeus Agustin, 2021)

### **Mitos Watchdog dan Pilar Keempat Demokrasi**

Nasihin Masha (2020) menyebutkan ada lima hubungan pers dan pemerintah. Yakni, watch dog (anjing pengawas), guard dog (anjing penjaga), lap dog (anjing penjilat), circus dog (anjing sirkus), dan stupid dog (anjing bodoh). Kecuali watchdog, semua karakteristik yang disebutkan di atas adalah akrobat pers untuk bersama, bekerja sama, dan bahkan menjilat kekuasaan. Ayse Fulya Sen (2021) mendeklarasikan jurnalisme watchdog bekerja untuk kepentingan publik. Jurnalisme watchdog menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. Watchdog untuk memperkuat akuntabilitas demokrasi. Jurnalisme watchdog selalu memantau aktivitas kekuasaan.

Menurut Julianne Schultz (1988) pers watchdog bukan suara tiga pilar demokrasi yang lain. Pers berdiri sendiri secara independen. Pers menjadi pilar keempat demokrasi karena mengawasi semua aktivitas tiga pilar yang lainnya. Di sisi lain, pers pun tidak bisa dijadikan bagian dari tiga pilar. Inilah fungsi krusial jurnalisme watchdog, sambung Okechukwu Chukwuma (2017), dalam kehidupan bernegara. Jika menjadi bagian dari tiga kekuasaan tersebut, maka jurnalisme akan kehilangan fungsi kritik atau kontrolnya. Nic Newman dkk (2012) dan Parbhat Ranjam dan Sindhuja (2014) menyebutkan syarat mutlak pers menjadi pilar keempat demokrasi adalah kehadiran wartawan yang independen, memiliki otonomi politik, adanya akuntabilitas, dan meniscayakan pertanggungjawaban. Kehilangan karakteristik di atas meniscayakan pers sebagai pilar keempat demokrasi hanyalah mitos.

Richard M Perloff (2020) menyebutkan bahwa pers yang berhak menyanggah status pilar keempat adalah jurnalisme investigasi, bukan jurnalisme secara keseluruhan. Sebab, jurnalisme investigasi dan jurnalisme pada umumnya adalah dua hal yang berbeda. Jurnalisme investigasi adalah jurnalisme yang mengungkap dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik kekuasaan negara dan merugikan kepentingan publik. Nael Jebril (2013) menyebutkan tiga karakteristik dasar jurnalisme watchdog yang meliputi objektif, faktual, dan kritis. Mireya Marquez-Remirez dkk (2019) menjadikan mengontrol kekuasaan dan mengawasi perilaku elite sebagai prasyarat jurnalisme watchdog.

Sedangkan jurnalisme pada umumnya (termasuk ketika pandemi covid-19) hanya mengabarkan fakta yang ada di permukaan saja. Ia tidak membongkar



sesuatu yang tersembunyi. Justeru tidak sedikit jurnalisme pada umumnya menghadirkan pertautan “haram” antara jurnalisme, politisi, dan negara. Inilah yang menghasilkan paradoks pers sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi.

Ishadi SK (2014) menegaskan penyebab utama media tidak bisa independen adalah pemerintah dan pemilik media. Keduanya melakukan manipulasi dengan beragam cara menutup berita yang akan mengganggu reputasi mereka. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2007) menyebutkan loyalitas pertama jurnalisme adalah pada warga bukan pada pemilik media atau kekuasaan. Pers yang mengutamakan selain warga sejatinya telah mengebiri independensi pers itu sendiri. Pers sejatinya adalah pemantau independen terhadap kekuasaan.

James Curran (2002) menyebutkan 11 faktor yang menyebabkan media kehilangan gigi untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Yakni, state censorship, high entry costs, media concentration, corporate ownership, mass market pressures, consumer inequalities, advertising influence, rise of public relations, news routine and values, unequal resources, and dominant discourses.

Berdasarkan kacamata faktor-faktor yang disebutkan di atas, maka jurnalisme selama pandemi covid-19 tidak memenuhi kriteria pers sebagai pilar demokrasi. Ia bukan watchdog atau the fourth estate of democracy, sebab fellowship jurnalisme perubahan perilaku adalah corong dan suara pemerintah. Tantangan membangkitkan kembali media sebagai pilar keempat demokrasi pasca pandemi covid-19 harus diawali dari keniscayaan untuk lepas dari struktur politik dan kekuasaan ekonomi (Syarwi, 2008); (Claire Hooker dkk, 2012).

## **Hubungan Media-Negara pasca Pandemi**

Media tidak lahir atau berada di ruang hampa yang tanpa kepentingan. Pun, media bukan wilayah suci dan sakral yang tidak mengenal kepentingan politik sesaat. Media adalah arena kontestasi semua pihak yang memiliki beragam tujuan. Sebab kebebasan pers membuka berbagai kepentingan bertarung yang bahkan tak kenal belas kasihan

Media kontemporer memiliki banyak wajah. Ia bukan hanya sebagai lembaga sosial (yang nirlaba), media adalah industri yang mengutamakan keuntungan daripada kerja sosial. Sebagai industri, media mengakumulasi modal. Media saling terhubung dalam jaringan yang lebih besar dan ada kepentingannya yang mandiri.

Wajah media lain adalah sebagai institusi demokrasi. Karenanya ia tidak bisa terhindar dan pasti terafiliasi dengan kekuatan politik (partai politik, misalnya). Lumrah bila media tersebar dalam memusatkan dan mengakumulasi kekuasaan politik. Ketika media berkolaborasi dengan penguasa politik, jadilah ia partisan, dan menjadi alat propaganda. Makanya hubungan media dengan kekuasaan selalu menempatkan media sebatas alat legitimasi rezim penguasa (Laporan Tahunan AJI 2010); (Noam Chomsky, 1989); (Louis Althusser, 2015); Muhammad Thaufan Arifuddin (2016)

Beragam kepentingan media diinstitusionalisasikan melalui pengetahuan dan rutinitas jurnalistik (Shoemaker and Reese, 2014). Media mengenal rating and share, clickbait, dan page view sehingga memformulasikan untuk mengukur

audiens dan keuntungan. (Diana Bossio, 2017); (Fiona Martin and Tim Dwyer, 2019). Ari Heinonen (1999).

Mungkin sudah menjadi sesuatu yang klasik perdebatan antara hubungan media dan negara. Namun, dalam konteks, permintaan kepada pemerintah/negara untuk membantu industri media, wartawan, pekerja media yang terdampak krisis pandemi covid-19, menjadi relevan untuk diapungkan kembali.

Dalam konteks hari ini, media meminta bantuan negara bukan sebuah tindakan yang salah (Julia Cage, 2016). Sebab kini di dunia yang serba-terhubung' ketika realitas luar biasa kompleks, dan relasi yang teramat rumit di antara semua realitas, tidak ada lagi realitas yang bisa berdiri sendiri (Yasraf Amir Piliang, 2010). Semuanya interdependensi; media tidak lagi bisa bersikap netral atau imparial sepenuhnya. Semuanya tergantung konteksnya. (Kari Karppinen and Hallvard Moe, 2016). Semua realitas berpihak atau melekat pada posisi tertentu, termasuk keberpihakan politik media. Semua media tidak bisa polos dengan bersembunyi di balik kata objektif (Steven Maras, 2013).

Tidak ada yang salah dengan sikap media terhadap negara. Ini hanya persoalan ruang dan waktu; permasalahan konteks (pandemi covid-19). Justeru akan menumbuhkan persoalan tersendiri jika media tidak melakukan permintaan itu. Akan banyak perusahaan media yang tutup, kualitas informasi menurun karena hambatan finansial wartawan, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sesungguhnya permintaan bantuan media kepada negara bukan barang baru di negara ini. Ketika rezim Orde Baru, banyak media yang meminta tolong

agar tidak dibrendel. Ada juga yang meminta diizinkan kembali terbit. (Atmakusumah, 2009). Alasannya sama (namun konteksnya berbeda), ancaman pengangguran, keberlangsungan informasi, dan sebagainya. Publik tidak tahu di belakang permohonan itu, ada kesepakatan di belakang meja, hidden agenda tertentu, kepentingan sesaat atau bahkan kongkalikong antara negara dan media.

Salah satu persoalan besar media di Indonesia adalah konglomerasi media yang sudah akut dan menahun. Hanya ada sekitar sembilan (Yanuar Nugroho, 2012), dan 13 orang (Marlyna Lim, 2012), saja yang menguasai media di Indonesia. Semua konglomerasi media berhubungan erat dengan politik. Hanya saja ada yang terang-terangan dan yang terlibat secara diam-diam atau terlibat di bawah meja.

Konglomerasi media meniscayakan pemusatan bisnis media yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat menyangkut konten siaran/pemberitaan pers, sekaligus mendorong pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Jurnalisme yang semula dari, oleh, dan untuk warga berubah menjadi dari, oleh, dan untuk kepentingan konglomerat. Konglomerasi meniadakan diversity of ownership dan diversity of content yang membuat penyeragaman opini publik. Bahaya konglomerasi media tidak bisa dicegah melalui UU lain selain UU itu sendiri. Penyeragaman opini dan kekuatan politik-kekuasaan dan ekonomi-bisnis oleh kekuatan media akan mengancam kebebasan pers dan demokratisasi media itu sendiri.

Pemilik modal mengontrol media, wacana, politik, dan agenda publik. Konglomerasi sudah menghegemoni wacana publik. Dengan media, elite politik

pemilik media membeli warga negara secara gratis karena televisi terestial yang sesungguhnya pemilik utamanya adalah publik. Pemilik media menjual berita sebagai komoditas padahal pada awalnya informasi bersifat gratis. Pemilik media sebagai elite politik menggeser masyarakat sebagai warga negara menjadi sekadar konsumen yang menguntungkan mereka. (Ade Armando, 2016).

Konglomerasi pun menyebabkan produksi jurnalisme yang berlimpah. Kondisi ini meniscayakan penurunan kualitas jurnalisme (Ignasius Haryanto, 2014). Di sisi lain, tergerusnya idealisme wartawan kalau sudah masuk ruang redaksi/pemaksaaan dari pemilik media. Terakhir, kondisi jurnalisme yang dikuasai elite politik menyebabkan krisis epistemologi (Yasraf Amir Piliang, 2011)

Eoin Devereux (2003) menyebutkan tujuh kritik terhadap konglomerasi. Pertama, terjadi konsentrasi kepemilikan media oleh segelintir orang. Kedua, banyak pemilik media yang memiliki kepentingan selain media. Ketiga, konglomerasi media menyebabkan penguasaan informasi pada segelintir orang. Keempat, pemberitaan cenderung mengarah ke populisme, infotainment, dan hiburan. Kelima, redefinisi audiens sebagai konsumen bukan warga. Keenam, akses yang tidak setara terhadap isi media dan teknologi media. Ketujuh, kekuatan ekonomi politik personal yang menguasai kerajaan media.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah jurnalisme (di era) krisis. Ia dihadirkan pemerintah secara insidental karena pandemi covid-19. Tujuannya untuk membantu keuangan wartawan yang terimbas krisis media. Jurnalisme krisis berisi kampanye dan promosi penanganan pandemi covid-19. Pers release dan kebijakan pemerintah dari pusat hingga daerah menjadi sumber utama jurnalisme krisis ini.

Di sisi lain, Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku memunculkan aspek lain, yakni, krisis jurnalisme. Karya jurnalisme yang dihasilkan dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak mencerminkan nilai dan prinsip jurnalisme. Nilai-nilai jurnalisme seperti independensi dan imparialitas, absen dalam produk Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Pemberian insentif/uang untuk wartawan dan kurator setiap bulannya adalah salah satu pemicunya. Dalam konteks ini, pandemi covid-19 menambah penyebab krisis jurnalisme yang pernah ada selain campur tangan elite politik, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, migrasi iklan ke e-commerce, kehadiran media sosial, dan perubahan budaya masyarakat.

Kehadiran atau bantuan pemerintah (dalam bentuk uang) kepada media dan wartawan merupakan investasi yang setiap saat bisa ditagih kepada media dan wartawan jika pemerintah membutuhkannya. Utang atau kebaikan pemerintah kepada media dan wartawan ketika pandemi covid-19 tidak berbeda dengan bantuan pemerintah ketika rezim Orde Baru.

Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini menjadikan daya cengkram kekuasaan kepada media di Indonesia semakin kuat atau kian hegemonik. Dengan demikian, nasib media ke depan kian mengemaskan dan mengkhawatirkan. Setelah dikuasai politisi dan konglomerasi, kini melalui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku, media di Indonesia dikuasai negara.

Kajian Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis kajian ini berkontribusi pada pengembangan teori jurnalisme khususnya di masa krisis, relasi media, negara, dan demokrasi, serta human relations, jurnalisme, dan negara. Dalam situasi dan kondisi krisis, jurnalisme memiliki watak dan karakteristik sendiri. Ia berbeda ketika situasi normal. Pun, terdapat perbedaan antara krisis jurnalisme yang dipicu digitalisasi, krisis ekonomi negara, dan pandemi covid-19

Sedangkan pada tataran praktis kajian Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini memberikan pelajaran pada pengelolaan media ketika krisis, liputan wartawan ketika krisis, dan sikap pemerintah dalam membantu media dan wartawan keluar dari jeratan krisis. Meski kajian ini terbatas pada masa pandemi covid-19, tetapi akan menjadi pelajaran di masa depan jika kejadian serupa berulang.

Ke depan kajian Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini bisa diperluas dengan metode penelitian lain seperti analisis isi kuantitatif atau kualitatif untuk mengkaji semua produk jurnalisme Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Bisa juga dilakukan perbandingan fellowship jurnalisme yang diselenggarakan negara/pemerintah dengan lembaga swasta dan individu.

Penelitian tentang perbandingan respons dan bantuan negara kepada media dan wartawan di beberapa negara dalam pandemi covid-19 juga menarik dilakukan. Begitu juga kajian tentang perbandingan subsidi negara di era normal, crowdfunding, dan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Racquel Garcia and Jaime Zeus Agustin. 2021. *Dominant Voices in the Time of a Global Disaster: Representation of Science in Online News Reportage of The COVID-19 Pandemic*. SEARCH Journal of Media and Communication Research. Online ISSN: 2672-7080. SEARCH Journal 2021 SEARCH 13(1), 2021, 19-29. <http://search.taylors.edu.my>
- Althausser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara: (Catatan-Catatan Investigasi)*. Jakarta. IndoPROGRESS.
- Arifuddin, Muhammad Thaufan. 2016. *Why Political Parties Colonize the Media in Indonesia: An Exploration of Mediatization*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 20, Nomor 1, Juli 2016 (16-33) ISSN 1410-4946
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Armando, Ade. 2016. *Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global*. Jakarta. Kompas
- Atmakusumah. 2009. *Tuntutan Zaman ; Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta. Spasi & VHR Book
- Bernadas, Jan Michael Alexandre C, Karol Ilagan. 2020. *Journalism, Public Health, and COVID-19: Some Preliminary Insights from the Philippines*.  
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1329878X20953854>.  
<https://doi.org/10.1177/1329878X20953854>

- Bossio, Diana. 2017. *Journalism and Social Media; Practitioners, Organisations, and Institutions*. Switzerland. Palgrave Macmillan
- Cage, Julia. 2016. *Saving Media; Capitalism, Crowdfunding, and Democracy*. Cambridge, Massachusetts London, England. The Belknap Press Of Harvard University Press
- Cahyadi, Firdaus. 2011. *Konglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika*. Jakarta. Knowledge Department, One World Indonesia
- Chomsky, Noam, 1989. *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies*. Montréal. CBC Enterprises,
- Chukwuma, Okechukwu. 2017. *Influence of the New Media on the Watchdog Role of the Press in Nigeria*.  
[https://www.researchgate.net/publication/330096144\\_Influence\\_of\\_the\\_N  
ew\\_Media\\_on\\_the\\_Watchdog\\_Role\\_of\\_the\\_Press\\_in\\_Nigeria](https://www.researchgate.net/publication/330096144_Influence_of_the_New_Media_on_the_Watchdog_Role_of_the_Press_in_Nigeria). DOI:  
10.19044/esj.2017.v13n2p126
- Curran, James. 2002. *Media and Power*. London. Routledge
- Devereux, Eoin. 2003. *Understanding the Media*. London. Routledge
- Estella, Pauline Gidget. 2020. *Journalism Competence and the COVID-19 Crisis in Southeast Asia Toward Journalism as a Transformative and Interdisciplinary Enterprise*. Pacific Journalism Review.  
<https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/1132>
- Fahlen, Matilda. 2016. *The future of Independent Journalism* Seminar on Media and Journalism, 2<sup>nd</sup> Semester 2016.  
[https://www.researchgate.net/publication/340385172\\_The\\_future\\_of\\_inde](https://www.researchgate.net/publication/340385172_The_future_of_inde)

pendent\_journalism\_-\_student\_essay\_at\_ISCTE\_-

\_part\_of\_masters\_program\_through\_Erasmus\_exchange

- Ferreira, Gil Baptista and Susana Borges . 2020. *Media and Misinformation in Times of COVID-19: How People Informed Themselves in the Days Following the Portuguese Declaration of the State of Emergency*. Journalism and Media. <https://www.mdpi.com/2673-5172/1/1/8>
- Fuller, Jack. 2010. *What is Happening to News*. Chicago. Chicago Press
- Haryanto, Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital; Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Heinonen, Ari. 1999. *Journalism in the Age of Net; Changing Society, Changing Profession*. University of Tempere, Finland
- Hirst, Martin. 2011. *News 2.0 ; Can Journalism Survive the Internet?* Australia. Allen and Unwin
- Hooker, Claire , Julie Leask, and Catherine King. 2012. *Media Ethics and Disease Outbreaks* (book chapter) . This is a pre-copyedited, author-produced PDF of a book chapter published by Ashgate Publishing following peer review. The definitive publisher-authenticated version [Hooker, C., Leask, J., King, C. (2012), 'Media ethics and infectious disease', in *Ethics and Security Aspects of Infectious Disease Control*. Eds. Christian Enemark and Michael J. Selgelid, Farnham: Ashgate, 2012, pp. 161–178. Copyright © 2012], is available online at

<http://www.ashgate.com/isbn/9781409422532> . Used by permission of the Publishers 2015

- Ishara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta. Kompas
- Jebril, Nael 2013. *Is Watchdog Journalism Satisfactory Journalism? A Cross-national Study of Public Satisfaction with Political Coverage*. Reuters Institute for the Study of Journalism
- Kari Karppinen & Hallvard Moe (2016) *What We Talk About When Talk About “Media Independence”*, Javnost - The Public, 23:2, 105-119, DOI: 10.1080/13183222.2016.1162986
- Kovach, Bill and Tom Rosenstiel. 2007. *The Elements of Journalism*. New York, Amerika Serikat : Three Rivers Press.
- ----- 2010. *Blur : Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*. Penerjemah Imam Shofwan dan Arif Gunawan Sulistiyono. Jakarta. Dewan Pers.
- López-García, X. Costa-Sánchez, C. Vizoso, Á. *Journalistic Fact-Checking of Information in Pandemic: Stakeholders, Hoaxes, and Strategies to Fight Disinformation during the COVID-19 Crisis in Spain*. Int. J. Environ. Res Public Health 2021, 18, 1227. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031227>
- Lowrey, Wilson and Peter J. Gade (ed). 2011. *Changing The News ; The Forces Shaping Journalism in Uncertain Times*. London. Routledge.

- Lim, Merlyna. 2012. *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Participatory Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States & The Ford Foundation
- Macleod, Hugh. 2021. *COVID-19 and the Media: A Pandemic of Paradoxes* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3852816](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3852816)
- Márquez-Ramírez, Mireya, etc. 2019. *Detached or Interventionist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countries*. The International Journal of Press/Politics 2020, Vol. 25(1) 53– 75 [sagepub.com/journals-permissions](https://www.sagepub.com/journals-permissions) DOI: 10.1177/1940161219872155
- Maras, Steven. 2013. *Objektivitas in Journalism*. Cambridge : Polity Press
- Martin, Fiona, and Tim Dwyer. 2019. *Sharing News Online; Commentary Cultures and Social Media News Ecologies*. Switzerland. Palgrave Macmillan
- Masha, Nasihin. 2020. *Jungkir Balik Pers; Masa Depan Pers dalam Pergumuan Internet of Things dan Konglomerasi Media*. Jakarta. Republika.
- Newman, Nic, William H. Dutton, and Grant Blank. 2012. *Social Media in the Changing Ecology of News: The Fourth and Fifth Estates in Britain*. International Journal of Internet Science 2012, 7 (1), 6–22 ISSN 1662-5544 IJIS.NET. [https://www.ijis.net/ijis7\\_1/ijis7\\_1\\_newman\\_et\\_al.pdf](https://www.ijis.net/ijis7_1/ijis7_1_newman_et_al.pdf)

- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, and Shita Laksmi. 2012. *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance. Jakarta. [www.cipg.co.id](http://www.cipg.co.id)
- Nur Asiyah, Dewi 2021
- Pavlik, John V. 2021. *Engaging Journalism: News in the Time of the COVID-19 Pandemic*. SEARCH Journal of Media and Communication Research. Online ISSN: 2672-7080. SEARCH Journal 2021SEARCH 13(1), 2021, 1-17. <http://search.taylors.edu.my>
- Parahita, Gilang Hesti. 2020. *Lima Dimensi dalam Jurnalisme Krisis Covid-19 dalam Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*. Editor Wawan Mas'udi and Poppy. S. Winanti. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. page.321-433
- Parahita, Gilang Desti. 2021. *The COVID-19 Pandemic Resilience of Indonesian Journalists*. Pacific Journalism Review . <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/1191>
- Perloff, Richard M. 2020. *The Dynamics of News; Journalism in the 21<sup>st</sup> Century Media Milieu*. London and New York. Routledge
- Perreault, Mildred F and Gregory P. Perreault. 2021. *Journalists on COVID-19 Journalism: Communication Ecology of Pandemic Reporting*. American Behavioral Scientist. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002764221992813>. <https://doi.org/10.1177/0002764221992813>

- Piliang, Yasraf Amir. 2010. *Post-realitas; Realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika*. Cetakan III. Yogyakarta. Jalasutra
- ----- 2011. *Dunia yang Dilipat*. Cetakan 1. Bandung. Matahari.
- Posetti, Julie etc, 2020. *Journalism, 'Fake News' & Disinformation*. [http://www.unesco.or.id/publication/UNESCO\\_Journalism\\_FakeNews\\_Disinformation\\_Handbook\\_For\\_Journalism\\_Education\\_2018\\_Printer\\_Friendly.pdf](http://www.unesco.or.id/publication/UNESCO_Journalism_FakeNews_Disinformation_Handbook_For_Journalism_Education_2018_Printer_Friendly.pdf)
- Ranjan, Prabhat and Sindhuja.2014. *Media as the Fourth Estate of Democracy*. <https://libgen.ggwz.net/book/71699472/0cf81f>
- Ripollés, Andreu Casero. 2020. *Impact of COVID-19 on the Media System. Communicative and Democratic Consequences of News Consumption during the Outbreak*. DOI: 10.3145/epi.2020.mar.23
- Salman, Ali. 2021. *Media Dependency, Interpersonal Communication and Panic during the COVID-19 Movement Control Order*. SEARCH Journal of Media and Communication Research Online ISSN: 2672-7080  
SEARCH Journal 2021 SEARCH 13(1), 2021, 79-92  
<http://search.taylors.edu.my>
- Şen, A. F. (2021). *Watchdog Journalism during the Coronavirus Crisis in Turkey*. Advances in Applied Sociology, 11, 500-512.<https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.1110044>

- Schoemacher, Pamela J and Stephen D. Reese. 2014. *Mediating the Message : Theories of Influences on Mass Media Content*. Third Edition. New York. Routledge
- Schultz, Julianne. 1998. *Reviving The Fourth Estate*. United Kingdom. Cambridge University Press
- Siapara, Eugenia. 2012. 2012. *Understanding New Media*. California. USA : Sage Publications.
- SK, Ishadi. 2014. *Media dan Kekuasaan: Televsi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Supadiyanto. 2020. *(Opportunities) Death of Newspaper Industry in Digital Age and Covid-19 Pandemic*. Jurnal The Messenger, Vol. 12, No. 2, July 2020, pp. 192-207 P-ISSN: 2086-1559, E-ISSN: 2527-2810. DOI: 10.26623/themessenger.v12i2.2244
- Sushmita, C.I., Pawito, and Rahmanto A.N. 2021. *Covid-19 and Journalism Conundrums: A Study on Dilemmas in Content Selection*. Jurnal Studi Komunikasi, 5(2). doi: 10.25139/jsk.v5i2.287
- Syahputra, Iswandi etc. 2021. *Pandemic Politics and Communication Crisis: How Social Media Buzzers Impaired the Lockdown Aspiration in Indonesia*. SEARCH Journal of Media and Communication Research Online ISSN: 2672-7080. SEARCH Journal 2021 SEARCH 13(1), 2021, 31-46. <http://search.taylors.edu.my>



- Syarwi. 2008. *Paradoks Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 12 Nomor 2. November. ISSN1410-4946 (121-256)
- Tshabangu, Thulani and Abiodun Salawu. 2021. *An Evaluation of Constructive Journalism in Zimbabwe: A Case Study of The Herald 's Coverage of the Coronavirus Pandemic*. Journal of African Media Studies. September 2021. DOI: 10.1386/jams\_00060\_1
- Utomo, Wisnu. Prasetya. 2020. *Jurnalisme Krisis dan Krisis Jurnalisme di Era Covid-19 dalam Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*. Editor Wawan Mas'udi and Poppy. S. Winanti. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press . page.300-320
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Star to Finish*. New York, London Guilford Press

## **LAPORAN**

- Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen. 2010. *Ancaman Itu Datang dari Dalam*. Jakarta

## **DISERTASI**

- Iskandar, Dudi. 2017 disertasi di Universitas Padjadjaran, Bandung, berjudul *Representasi Ideologi Kekuasaan dalam Konvergensi Media (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pemberitaan Kampanye*

*Pemilihan Presiden 2014 di Kompas Grup, Media Grup, dan MNC Grup).*

Disertasi ini sudah dikonversi menjadi buku berjudul *Konvergensi Media; Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2018

## SUMBER LAIN

- <http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/2244>. Accessed on February 17, 2021
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200716165843-4-173319/efek-pandemi-corona-the-guardian-bbc-phk-ratusan-karyawan>. Accessed on February 17, 2021
- [https://aji.or.id/upload/article\\_doc/Riset\\_IFJ.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Riset_IFJ.pdf). Accessed on February 12, 2021
- [https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Skema\\_Insentif\\_Ekonomi\\_untuk\\_Industri\\_Media\\_rev-ljh.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Skema_Insentif_Ekonomi_untuk_Industri_Media_rev-ljh.pdf). Accessed on February 17, 2021. The Press Council is an independent institution that functions to develop and protect the life of the press in Indonesia. The Press Council was established in 1966 through Law Number 11 of 1966 concerning the Basic Provisions of the Press. Now, the existence of the Press Council is based on Law no. 40 of 1999 concerning the Press,
- <https://republika.co.id/berita/qhbkwi380/dewan-pers-insentif-bagi-media-secepatnya-disalurkan>. Accessed on February 17, 2021
- Buletin Etika Vol 11 November 2020, Jakarta, Dewan Pers
- Buletin Etika Vol 17 Mei 2021, Jakarta, Dewan Pers
- Buletin Etika Vol 20 Agustus 2021, Jakarta, Dewan Pers

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### REALISASI BIAYA

No.	Jenis Pengeluaran	Realisasi Biaya
1.	Honorarium Peneliti	Rp. 3.000.000.-
2.	Honorarium 2 asisten peneliti @ 500.000.-	Rp. 1.500.000.-
3.	Peralatan dan bahan habis pakai: <ul style="list-style-type: none"><li>- Flashdisk @200.000.- x 3</li><li>- Tinta Printer</li><li>- Kertas</li></ul>	Rp. 600.000.- Rp. 200.000.- Rp. 200.000.-
4.	Operasional kegiatan penelitian <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya pengumpulan dan pengolahan data</li><li>- Biaya pustaka</li><li>- Biaya penggandaan (fotocopy)</li><li>- Biaya penjilidan</li></ul>	Rp. 2.000.000.- Rp. 1.000.000.- Rp. 1.000.000.- Rp. 500.000.-
5.	Lain-lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya pertemuan antara peneliti dengan asisten <i>coder</i> @ 500.000.- x 4</li><li>- Pembuatan laporan akhir</li></ul>	Rp. 1.500.000.-  Rp. 1.000.000.- Rp. 500.000.- Rp. 500.000.-
	Total	Rp. 13.500.000.-

(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

## **Lampiran 2**

### **Instrumen Penelitian**

#### **WAWANCARA**

1. Interview with Press Council member Agus Sudibyo at the Grand Zury Hotel, Serpong, South Tangerang, Monday, December 6, 2021.
2. Interview with the Deputy Secretary of the Indonesian Journalists Association (PWI) Suprpto Center at the Grand Zury Hotel, Serpong, South Tangerang, Monday, December 6, 2021
3. Virtual interview via the zoom application with the General Chairperson of the Alliance of Independent Journalists (AJI) for the 2017-2020 period, Abdul Manan, Tuesday, December 7, 2021.
4. Interview with the Chairperson of the Alliance of Independent Journalists (AJI) for the period 2021-2024, Sasmito Madrim at the Jakarta State University (UNJ) Campus, Friday, November 26, 2021.
5. Virtual interview via Zoom application with curator of Behavior Change Journalism Fellowship Dhimam Abrar, Wednesday, November 10, 2021
6. Virtual interview via zoom application with behavior change journalism Fellowship journalist Muhamad Hakim, Saturday, November 27, 2021
7. Interview with the General Chairperson of the Indonesian Television Journalists Association (IJTI) Herik Kurniawan, at the IJTI Office, Jakarta, Monday, December 6, 2021

### Lampiran 3

#### Biodata Peneliti

#### BIODATA PENELITI

##### IDENTITAS PENELITI

##### KETUA

Nama Lengkap : Dr. Dudi Iskandar, S.Ag, M.I.Kom  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan Fungsional : Lektor  
NIDN : 0305037208  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 5 Maret 1972  
E-mail : [dudi.iskandar@budiluhur.ac.id](mailto:dudi.iskandar@budiluhur.ac.id),  
Nomor Handphone : 081388143580  
Alamat : PBH F8-8 Pondok Aren, Tangerang Selatan

##### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	IAIN SGD Bandung	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Universitas Padjadjaran, Bandung
Bidang Ilmu	Ilmu dakwah/Komunikasi Islam	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi
Tahun Masuk-Lulus	1991-1996	2010-2012	2015-2017

##### C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Hubungan antara Pengetahuan Agama Wartawan dan Pemberitaan LGBT di Suara pembaruan	Universitas Budi Luhur	15.000.000
2	2018	Hubungan antara Pengetahuan Agama Wartawan dan Pemberitaan LGBT di Koran Sindo	Universitas Budi Luhur	15.000.000
3	2017	Hubungan antara Pengetahuan Agama Wartawan dan Pemberitaan LGBT di Republika	Universitas Budi Luhur	15.000.000

**ANGGOTA PENELITI :**

Nama Lengkap : Geri Suratno, S.I.Kom, M.I.Kom  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
 Tempat, Tanggal Lahir : Klaten 11 Oktober 1984  
 NIDN : 0311108409  
 No Telepon : 081332208123  
 Email : [geri.suratno@budiluhur.ac.id](mailto:geri.suratno@budiluhur.ac.id)  
 Alamat : Jalan Karyawan 3 RT 02 RW 09 Karang Tengah

Lampiran 4

Surat Perjanjian Kontrak



## **SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN**

Nomor A/UBL/DRPM/000/018/04/22

Pada hari ini, Rabu 20 April 2022 Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Krisna Adiyarta M., S.Kom, M.Sc**, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom**, selaku Peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **KEBIJAKAN STRATEGIS NEGARA DI BIDANG MEDIA DAN PRAKTIK JURNALISTIK DI ERA PANDEMIK COVID-19**

### **Pasal 2**

#### **Personalia Penelitian**

Peneliti Utama : Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom

Anggota Peneliti : Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom

### **Pasal 3**

#### **Waktu dan Biaya Penelitian**

1. Waktu penelitian adalah 6 bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.
2. Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp 13,500,000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

### **Pasal 4**

#### **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya penelitian diberikan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 5**

#### **Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.





3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti sebagai pemberi dana.

## **Pasal 6** **Monitoring Penelitian**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kemajuan penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022.
4. Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 7** **Laporan Akhir Penelitian**

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir dalam bentuk softcopy, paling lambat tanggal 30 Juni 2022.

## **Pasal 8** **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada semester berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
2. PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai dengan tanggal 14 Juli 2022.
3. Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA.



## Pasal 9 Penutup

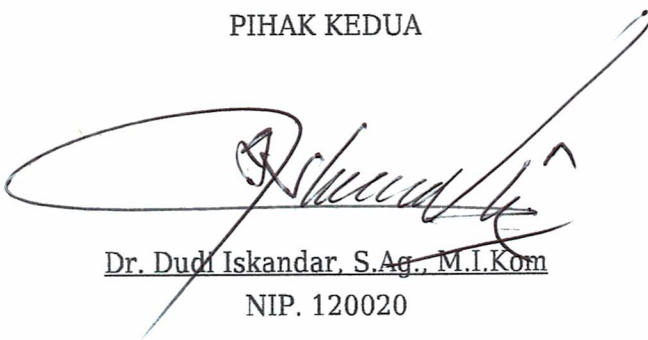
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 20 April 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
  
Dr. Krishna Adiyarta M., S.Kom, M.Sc  
NIP. 890001

  
Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom  
NIP. 120020

## Lampiran 5

### Catatan Harian

#### PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Jenis Kegiatan	Tahun					
		Bulan Januari 2022	Bulan Februari 2022	Bulan Maret 2022	Bulan April 2022	Bulan Juni 2022	Bulan Juli 2022
1	Penyusunan Proposal						
2	Pelaksanaan Penelitian	Observasi lapangan	Wawancara	Wawancara	Wawancara		
3	Penyusunan Laporan Kemajuan					Laporan Kemajuan	
4	Penyusunan Laporan Akhir						Laporan Akhir
5	Evaluasi						

### CATATAN HARIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 6 Desember 2021.	Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Grand Zury Hotel, Serpong, Tangerang Selatan,	Wawancara
2	Senin, 6 Desember 2021.	Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia Suprpto Center di Grand Zury Hotel, Serpong, Tangerang Selatan	Wawancara
3	Selasa, 7 Desember 2021.	Wawancara Virtual via zoom dengan mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2017-2020 Abdul Manan,	Wawancara
4	Jumat 26 November 2021.	Wawancara derngan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen 2021-2024, Sasmito Madrim di Universitas Negeri Jakarta	Wawancara

<b>5</b>	Rabu, 10 November 2021	Wawancara Virtual dengan salah seorang kurator JFPP Dhimam Abrar,	Wawancara
<b>6</b>	Sabtu, 27 November 2021	Wawancara Virtual dengan salah seorang wartawan JFPP Muhamad Hakim,	Wawancara
<b>7</b>	Senin, 6 Desember 2021	Wawancara dengan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Herik Kurniawan di Gedung Dewan Pers Jakarta	Wawancara

## Lampiran 5

### Artikel Ilmiah (Draf)

#### **NEGARA : ANTARA KRISIS MEDIA DAN KRISIS JURNALISME DI ERA PANDEMI COVID-19**

Dudi Iskandar

dudi.iskandar@budiluhur.ac.id

Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Budi Luhur Jakarta

Geri Suratno

geri.suratno@budiluhur.ac.id

Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Budi Luhur Jakarta

#### **ABSTRACT**

Pandemi covid-19 menyebabkan krisis di semua aspek kehidupan, termasuk pada ranah media dan jurnalisme. Banyak media yang mati karena kesulitan biaya operasional. Pun, tidak sedikit wartawan yang kehilangan pekerjaannya. Fakta inilah yang menjadi dasar pemerintah melalui Dewan Pers-Satgas Penanganan Covid-19 menggulirkan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pola, menganalisis aktivitas, dan memprediksi hubungan antara media dan negara pasca-Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus tipe tunggal holistik. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memotret konteks yang dinamis. Sedangkan studi kasus adalah metode untuk merekam sebuah peristiwa yang memiliki ukuran ruang dan waktu tertentu. Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku dilaksanakan Agustus-Desember 2021 yang melibatkan 7.276 wartawan dari 857 media (cetak, televisi, radio, dan daring) dan 26 kurator. Jumlah berita yang berhasil diproduksi sebanyak 288 607 buah. Jumlah berita itu terdiri dari 59.375 berita televisi, 7.314 berita radio, 140.493 berita media daring, dan 80.455 berita media cetak. Penelitian ini menemukan selama Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku jurnalisme mengalami krisis, kehilangan fungsinya sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Pemberian uang tunai kepada wartawan dan kurator selama fellowship menjadikan jurnalisme kehilangan independensinya. Untuk merevitalisasi fungsi pers, pasca pandemi covid-19, jurnalisme dan media harus melepaskan diri dari kekuasaan, konglomerasi, dan kepentingan politik sesaat. Hanya dengan inilah jurnalisme berada di nilai kesejatiannya dan kokoh sebagai penyuar kepentingan publik.

**Keywords** : *jurnalisme krisis; krisis jurnalisme; pandemi covid-19; fellowship jurnalisme perubahan perilaku*



## A. PENDAHULUAN

Media mengalami beberapa kali krisis, baik yang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, (Julia Cage, 2016); Eugenia Siapara, 2012); Jack Fuller (2010); Martin Hirst (2011); Wilson Lawrey and Peter J. Gade, 2011) maupun yang disebabkan kondisi negara yang sedang goyah sendi-sendi ekonominya (Firdaus Cahyadi, 2011); (Supadiyanto, 2020).

Kini krisis media dipicu pandemi covid-19 (Julie Posetti dkk, 2020); Gilang Desti Parahita (2021). Kantor berita nasional Australia; The Australian Associated Press (AAP) telah memberhentikan 170 wartawan pada 26 Juni 2020, dan menutup layanan produksi editorialnya, pagemaster pada akhir Agustus 2020. AAP mulai diterbitkan pada tahun 1935 oleh penerbit surat kabar Keith Murdoch, ayah dari pendiri News Corp, Rupert Murdoch. AAP dimiliki oleh organisasi berita Australia: Australia News Corp, Nine Entertainment Co., Seven West Media, dan Australian Community Media.<sup>1</sup> Sementara itu, koran Inggris terkemuka The Guardian memotong jumlah karyawan sebanyak 180 orang. Hal yang sama dilakukan oleh BBC yang mengurangi jumlah karyawan dan wartawan yang mencapai 450 orang.<sup>2</sup>

Kajian dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan media dikaji juga di negara lain seperti Spanyol (Xosé López-García dkk, 2021); Portugal (Gil Babbista Ferreira and Susana Borget, 2020); Zimbabwe (Thulani Tshabangu and Abiodun Salawu, 2021); Filipina (Jan Michael Alexandre C Bernadas, Karol Ilagan. 2020); negara-negara Asia Tenggara (Pauline Gidget Estella, 2020). Media di Indonesia pun tidak lepas dari hantaman krisis yang dipicu pandemi covid-19 Chelin Indra Sushmita dkk (2021) mengetengahkan dilema wartawan Indonesia dalam memilih konten berita yang akan dihadirkan ke publik. Sedangkan Wisnu Prasetya Utomo (2020) menyoroti tentang jurnalisme krisis dan krisis jurnalisme di masa pandemi covid-19. Sementara itu, Gilang Hesti Parahita (2020) membahas tentang lima aspek jurnalisme krisis. Pertama, kesiapan wartawan melaporkan sinyal awal risiko covid-19. Kedua, liputan kritis terhadap intervensi pemerintah untuk penanganan krisis. Ketiga, penyampaian informasi yang mendalam dan akurat. Keempat, keberpihakan terhadap kelompok rentan. Kelima, keamanan liputan.

Inti berbagai penelitian di atas adalah pandemi covid-19 menghantam semua aspek media atau sistem media secara keseluruhan (Andreu Casero-Ripollés, 2020). Pandemi covid-19 menyebabkan kehidupan media di ambang kehancuran. Semua aspek ekonomi media seperti pembayaran gaji wartawan, pembelian kertas khusus media cetak, pembayaran pajak, dan sebagainya terganggu. Kini media di ambang kebangkrutan. (Hugh Macleod, 2021)

**Tabel 1**  
**Media yang Berhenti di Masa Pandemi Covid-19**

No	Nama Media	Jenis Media	Area Sirkulasi	Mulai tidak terbit
----	------------	-------------	----------------	--------------------

<sup>1</sup> <http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/2244>. Diakses pada 17 Februari 2021

<sup>2</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200716165843-4-173319/efek-pandemi-corona-the-guardian-bbc-phk-ratusan-karyawan>. Diakses pada 17 Februari 2021

1	Koran Tempo	Koran	Seluruh Indonesia	1 Januari 2021
2	Indo Pos	Koran	Seluruh Indonesia	30 Desember 2020
3	Suara Pembaruan	Koran	Seluruh Indonesia	1 Februari 2021
4	Indopos.com	Situs berita (Online)	-	30 Desember 2020

**Tabel 2**  
**Koran Yang Mengurangi Jumlah Halaman di Era Pandemi Covid-19**  
**(Nasihin Masha, 2020)**

No	Nama Koran	Jumlah Pengurangan Halaman
1	The Jakarta Post	Dari 12 halaman ke 8 halaman
2	Republika	Dari 24 halaman ke 16 halaman
3	Rakyat Merdeka	Dari 20 halaman ke 16 halaman
4	Kompas	Dari 24 halaman ke 16 halaman
5	Bisnis Indonesia	Dari 24 halaman ke 20 halaman

Hasil Survei Aliansi Jurnalis Independen-International Federation Journalist (AJI-IFJ)<sup>3</sup> menemukan di 38 kota dan jejaring media sosial menemukan sejumlah fakta, antara lain, sebanyak 83.5 persen responden terdampak perekonomiannya akibat pandemi, sedangkan 16.5 persen responden lainnya tidak. Dampak tersebut meliputi, pengurangan honor (53.9 persen), pemotongan gaji (24.7 persen), Pemutusan Hubungan Kerja (5.9 persen), perumahan karyawan (4.1 persen), dan lain-lainnya.

Ancaman PHK Ancaman hilangnya pekerjaan para pekerja media melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan sangat serius. Sebab, 74.9 persen responden menyatakan di perusahaannya tidak ada wadah serikat pekerja. Hanya 25.1 persen responden yang mengatakan di perusahaannya ada serikat pekerja.

Kesimpulan riset itu adalah pandemi berdampak serius terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan para pekerja media, antara lain pengurangan honor (53.9 persen), pemotongan gaji (24.7 persen), PHK (5.9 persen), perumahan karyawan (4.1 persen), dan lain-lainnya, maka penguatan serikat pekerja sangat mendesak dan penting direalisasikan. Apalagi, khusus dalam persoalan sengketa ketenagakerjaan, tidak banyak organisasi wartawan yang memiliki divisi/bidang khusus untuk mengurus kasus-kasus ketenagakerjaan.

**Tabel 3**  
**Media yang mengurangi jumlah wartawan dan karyawan di masa pandemi Covid-19**

<sup>3</sup> [https://aji.or.id/upload/article\\_doc/Riset\\_IFJ.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Riset_IFJ.pdf). Diakses pada 12 Februari 2021



No	Nama Media	Jenis Media	
1	Koran Tempo	Koran	Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)/pensiun dini
2	Indo Pos	Koran dan Online	Pensiun
3	Suara Pembaruan	Koran	Pensiun dini
4	The Jakarta Post	Koran	Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)/pensiun dini
5	Kumparan.com	Online	PHK
6	Jawa Pos	Koran dan Online	Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)/pensiun dini

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi ini, beberapa asosiasi media dan wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media bersama Dewan Pers<sup>4</sup> mengajukan tujuh permintaan kepada pemerintah.

1. Mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.
2. Mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.
3. Mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei - Desember 2020.
4. Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.
5. Mendorong negara menanggihkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

<sup>4</sup>[https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Skema\\_Insentif\\_Ekonomi\\_untuk\\_Industri\\_Media\\_rev-ljh.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Skema_Insentif_Ekonomi_untuk_Industri_Media_rev-ljh.pdf). Diakses pada 17 Februari 2021. Dewan Pers merupakan institusi independen yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri sejak 1966 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Kini, eksistensi Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,

Merespons permintaan Dewan Pers dan pengelola media tersebut, pemerintah berjanji memberikan sejumlah insentif bagi industri pers atau media. Ada tujuh poin kesepakatan terkait insentif dalam pertemuan tersebut. Pertama, pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam peraturan menteri keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.

Kedua, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media. Ketiga, pemerintah akan menanggihkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat keputusan presiden (keppres).

Keempat, pemerintah akan mendiskusikan penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media dengan BPJS Kesehatan. Kelima, pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

Keenam, pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan. Ketujuh, pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media lokal.<sup>5</sup>

### **Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku**

Bentuk bantuan keuangan negara di masa pandemi covid-19 kepada media dan wartawan berbeda. Media mendapat bantuan keuangan dari negara tidak dalam bentuk tunai. Sedangkan bantuan yang diberikan kepada wartawan berbentuk tunai yang diwujudkan melalui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19. Hanya saja Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku berbeda dengan bantuan tunai langsung atau bantuan sosial negara yang diterima masyarakat selama pandemi covid-19. Dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini wartawan yang ingin mendapat bantuan harus mendaftar dan membuat berita sesuai yang dipersyaratkan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19. Artinya, ada barter antara berita yang diproduksi dan bantuan yang diberikan negara.

Berdasarkan panduan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang dikeluarkan Dewan Pers-Satgas Penanganan Covid-19,<sup>6</sup> kegiatan ini bertujuan mengampanyekan perubahan perilaku dan protokol kesehatan. Perilaku yang dikampanyekan antara lain mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, berolahraga cukup, menjaga asupan vitamin dan gizi, memeriksakan diri jika merasa ada gejala, dan melaporkan diri jika ada gejala dan sebagainya.

Para peserta berperan untuk mengampanyekan, mengawasi pelaksanaan di lapangan, menunjukkan contoh-contoh keberhasilan, mengevaluasi kelemahan-

---

<sup>5</sup> <https://republika.co.id/berita/qhbkwi380/dewan-pers-insentif-bagi-media-secepatnya-disalurkan>. Diakses pada 17 Februari 2021

<sup>6</sup> Buletin Etika Vol 11 November 2020, Jakarta, Dewan Pers

kelemahan, mengangkat cerita kepeloporan/keteladanan, dan menampilkan kisah sukses pelaksanaan program ini.

Yang menjadi lokus liputan antara lain pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di ruang publik, fasilitas umum, lembaga pemerintahan/swasta, acara resmi publik, kegiatan pilkada, lingkungan tempat tinggal, dan komunitas

Bentuk laporan bisa hardnews, feature, atau indepth reporting. Contohnya perubahan perilaku dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan pada level komunitas, warga, dan lingkup pemerintahan. Bisa juga memuat tentang profil warga masyarakat yang berhasil melakukan isolasi/karantina mandiri. Contoh lain adalah kisah sukses pemimpin daerah mengendalikan pandemi, keteladanan tenaga medis, pemimpin informal, atau masyarakat biasa. Bisa juga berita yang berisi liputan tentang kearifan lokal yang mendukung pelaksanaan perubahan perilaku atau disiplin protokol kesehatan.<sup>7</sup> Sementara itu, isu lain juga diperbolehkan ditulis seperti stigmatisasi/diskriminasi terhadap penderita covid-19, stigmatisasi/diskriminasi terhadap tenaga medis, beban kelompok perempuan/ibu rumah tangga, gerakan para relawan untuk membantu penderita covid 19/masyarakat yang terdampak krisis, gerakan perempuan/ibu dalam sosialisasi cara hidup yang sehat atau membantu korban covid 19 di daerahnya, dampak ekonomi krisis terhadap masyarakat, dan gerakan/perspektif remaja/millennial dalam membantu korban/penanganan pandemi.

Dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini pun wartawan berfungsi sebagai hoax fact checker (Bill Kovach dan Tom Rosentiel. 2010). Wartawan harus menjernihkan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial dan/atau media massa tentang perubahan perilaku dan protokol kesehatan.<sup>8</sup>

Sedangkan topik tambahan liputan antara lain makanan sehat berdasarkan kearifan lokal, fakta dibalik obat-obat herbal/tradisional untuk meningkatkan imunitas, cerita/pengalaman klaster keluarga/kantor, kearifan lokal tentang makanan yang sehat, mengintrodukir makanan sehat setempat, dampak krisis terhadap industri pariwisata, fungsioanalisis hotel untuk rumah sakit darurat, dan kisah UMKM untuk bertahan, kreatif bahkan berkontribusi di masa pandemi

Peserta fellowship ini memiliki tanggung jawab moral dengan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dan melakukan kegiatan peliputan dengan mengindahkan sopan santun dan kepatutan. Juga peserta wajib memberi teladan pelaksanaan protokol kesehatan selama melakukan peliputan dan dalam kegiatan sehari-hari.<sup>9</sup>

Sedangkan tanggung jawab profesional antara lain menaati Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS, menulis minimal 11 berita (hardnews) setiap bulan, menulis minimal satu feature/liputan mendalam setiap bulan, berita dimuat di media masing-masing dan dikirimkan ke kanal berita khusus untuk program ini dan mengunggah berita di akun media sosial masing-masing.

Dalam menjalankan tugas sebagai peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku, wartawan harus menaati kode etik jurnalistik. Yakni, liputan dua sisi,

---

<sup>7</sup> Buletin Etika Vol 17 Mei 2021, Jakarta, Dewan Pers

<sup>8</sup> Buletin Etika Vol 20 Agustus 2021, Jakarta, Dewan Pers

<sup>9</sup> Buletin Etika Vol 11 November 2020, Jakarta, Dewan Pers

pemberitaan berimbang, menguji kebenaran informasi, memastikan kredibilitas sumber, akurasi data dan kutipan sumber.

Dalam setiap liputan, peserta wajib patuh, disiplin melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker secara benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, mengonsumsi makanan sehat, beristirahat cukup dan berolahraga secara teratur, memeriksakan diri jika ada gejala/merasa telah berinteraksi dengan orang yang terpapar virus covid-19, dan melaporkan diri/tidak berinteraksi dengan orang lain jika terpapar virus covid-19.

Peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku mendapat uang sebagai penggantian transportasi sebesar Rp. 1.600.000 setiap bulan selama 8 bulan (Mei-Desember 2021).<sup>10</sup> Sedangkan honor kurator sebesar Rp3.000.000 per bulan (Wawancara Agus Sudibyo)

Sesungguhnya permintaan dan pemberian insentif ekonomi kepada negara merupakan sesuatu yang dilematis dan problematis (Julianne Schultz, 1988; Julia Cage, 2016). Di satu sisi, media dan negara harus vis a vis. Media harus mengawasi jalannya pemerintah/negara. Media sebagai watchdog dan the fourth estate of democracy. Namun, pada sisi yang berlainan, kondisi pandemi covid-19 memaksa media menjalankan politik akomodatif karena kesulitan ekonomi (Gilang Hesti Parahita, 2021).

Sesungguhnya fellowship dalam dunia jurnalisme merupakan sesuatu yang biasa. Banyak lembaga independen menyediakan dan tak terhitung wartawan yang menerimanya. Misalnya, Reuters Institute, New York University (Arthur L Cartes Journalism Institute), Nieman Foundation for Journalism, South Asia Journalism Fellowship dan sebagainya. Tidak ada yang istimewa dari fellowship jurnalisme di era normal. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika fellowship diberikan oleh pemerintah/negara dan dalam situasi tidak normal atau krisis. Kekuasaan adalah sesuatu yang harus dikontrol media dan wartawan. Posisi vis a vis negara dan media inilah yang menjadikan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini menjadi problematis dan menimbulkan pro kontra di kalangan pegiat jurnalisme di Indonesia, meskipun kondisi media dan wartawan krisis ekonomi dihantam pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19? Kedua, apa makna yang dipersepsikan praktisi media tentang Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19? Ketiga, bagaimana potret hubungan antara media dan negara pasca Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19?

## **B. METODE PENELITIAN**

---

<sup>10</sup> Buletin Etika Vol 17 Mei 2021, Jakarta, Dewan Pers

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus tipe tunggal holistik. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dasar manusia sebagai makhluk bebas, independen, dan kreatif yang bisa menciptakan realitas sendiri yang bersifat subjektif. Ia bisa menentukan diri sendiri. Dari kebebasan dan kreativitas inilah makna/pemaknaan sebagai inti dari kualitatif timbul.

Robert K. Yin. (2011) menyebutkan lima karakter khas dalam penelitian kualitatif, yakni, kajian berfokus pada makna kehidupan yang berada di bawah permukaan atau tidak terlihat, sebagai representasi (menghadirkan kembali) pandangan atau perspektif masyarakat, berlatar belakang kontekstual, memberikan peluang munculnya konsep baru yang bisa menjelaskan tentang perilaku manusia, dan berusaha untuk menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh kebenaran atau kepercayaan.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Dalam hal ini konteks yang diteliti adalah kasus tunggal, yakni, Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19.

Sedangkan studi kasus adalah penelitian yang fokus pada satu objek tertentu. Objek tersebut dinamakan kasus. Ia dipandang sebagai sebuah satu kesatuan yang dibatasi pada ruang dan waktu tertentu. Penelitian studi kasus mengungkap secara utuh dan menyeluruh sebuah kasus yang terjadi. Kunci dari penelitian studi kasus adalah pertanyaan tentang *why* (kenapa) dan *how* (bagaimana) terjadinya satu kasus yang diteliti (Robert K. Yin. 2003).

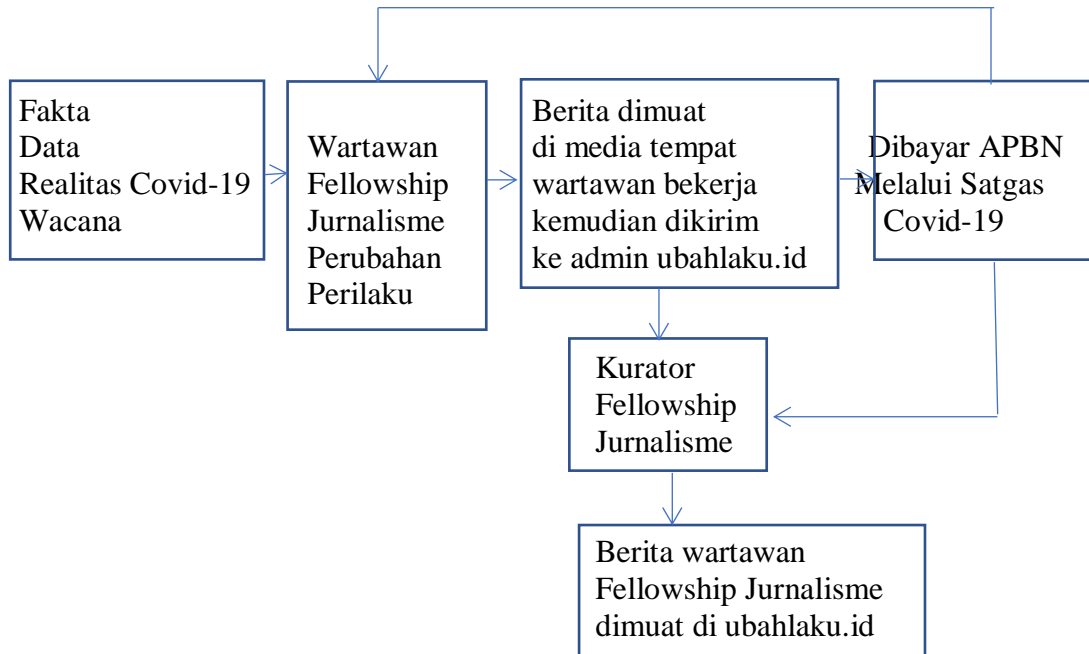
Jenis studi kasus terdiri dari kasus tunggal holistik, yakni, yang memiliki hanya satu unit analisis. Unit analisis menurut Suharsimi Arikunto (2010) merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Untuk penelitian ini yang menjadi objek atau kasus adalah Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19.

Observasi dilakukan terhadap berita dan foto yang dimuat di website ubahlaku.id, dokumen press release Dewan Pers, dokumen press release Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan dokumen press release Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sedangkan wawancara dilakukan dengan Dewan Pers (sebagai pihak yang menginisiasi fellowship ini), Satgas Penanganan Covid-19 (pihak yang memiliki anggaran untuk aktivitas fellowship), kurator berita (menilai melayakan sebuah berita), dan wartawan yang menulis untuk website ubahlaku.id. Wawancara juga dilakukan dengan dua organisasi wartawan yang berbeda kebijakan dalam kasus Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini, yakni, PWI (mendukung) dan AJI (menolak). Termasuk wawancara dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berada pada posisi tidak menolak dan tidak menerima.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara singkat pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang diselenggarakan Dewan Pers-Satgas Penanganan Covid-19 ini bisa digambarkan seperti di bawah ini :

**Gambar 3**  
**Pola Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku**



### **Problematika dan Dilema Fellowship**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penelusuran di lapangan tentang Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini, peneliti menemukan beberapa hal yang menarik. Yaitu :

Pertama, kualitas berita yang dihasilkan sangat rendah. Ini sangat berbeda dengan berita yang dihasilkan media mainstream. Produksi berita peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku hanya seputar memberitakan saja. Misalnya, kepala desa atau camat mengkampanyekan pemakaian masker Atau pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa menganjurkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak) di daerah tempat wartawan bekerja. Kualitas pemberitaan hanya sebatas itu. Tidak ada standar baku tentang kualitas berita yang diproduksi. Hal ini bisa dimengerti karena wartawan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku hanya disyaratkan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) level muda<sup>11</sup> yang diselenggarakan Dewan Pers yang bekerja sama dengan organisasi kewartawanan.

Problem kualitas berita ini pun diakui Dewan Pers sebagai penyelenggara Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Salah seorang anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan dengan mengetahui kualitas berita di Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini, maka Dewan Pers mendapat gambaran secara utuh tentang kualitas wartawan dalam menghasilkan secara utuh.

<sup>11</sup> Ada tiga level Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers bersama organisasi kewartawanan. Yakni, level muda, madya, dan utama.

“Ini salah satu pelajaran terpenting dari Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku,” ujar Agus. “Ini akan menjadi evaluasi dan masukan berharga bagi Dewan Pers untuk terus meningkatkan kualitas wartawan pasca Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini.”

Kelemahan kualitas berita ini pun disadari oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Wakil Sekretaris PWI Pusat, Suprpto, menyatakan salah satu alasan munculnya kualitas berita yang rendah disebabkan seleksi peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang kurang ketat. Peserta hanya dipersyaratkan sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan level muda. Artinya, baru wartawan pemula yang dari sudut pengalaman masih minim.

“(Kualitas rendah) ini bisa dimengerti karena Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini bertujuan hanya untuk menyebarkan atau kampanye protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi kualitas berita tidak diutamakan. Yang terpenting informasi tentang protokol kesehatan secepatnya tersebar,” jelas Suprpto.

Menurut Suprpto, ketika menghadapi pandemi covid-19 pemerintah (melalui Satgas Covid-19) menginginkan masyarakat mendapat informasi yang benar tentang pandemi covid-19. Sebab, banyak hoaks dan fake news yang berkembang di masyarakat, baik melalui jejaring dan media sosial ataupun situs berita yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers.<sup>12</sup>

Keinginan pemerintah untuk memberikan informasi yang benar tentang pandemi covid-19 ini, menurut Agus, karena ingin segera memberikan dan menyelesaikan informasi pandemi covid-19 yang benar berdasarkan keilmuan. “Jika 50 persen informasi tentang pandemi covid-19 yang disampaikan media kepada masyarakat benar berdasarkan keilmuan, maka penanganan masalah pandemi ini setengahnya sudah selesai,” tambah Agus.

Kedua, pengetahuan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tentang teori dan praktik jurnalistik sangat minim. Bahkan untuk pengetahuan tentang konstruksi 5W + 1H saja tidak tahu. Apalagi jika ditanya tentang etika jurnalisme yang sangat filosofis. Dipastikan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak mengetahuinya. Ini menjadi problem mendasar karena jurnalisme memiliki dua sisi yang saling mengisi, yakni teknik dan etik.

“Pengetahuan tentang jurnalisme tidak hanya diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga praktik di lapangan. Tidak semua wartawan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku berlatar belakang akademik komunikasi atau jurnalisme. Banyak wartawan yang yang tidak mengetahui jurnalisme secara teoritis. Mereka langsung terjun ke dunia jurnalisme tanpa pengetahuan yang memadai tentang jurnalisme,” papar salah seorang kurator, Dhimam Abror.

Minimnya level pemahaman tentang teori jurnalisme, menurut Agus Sudibyo, akan menjadi pekerjaan rumah Dewan Pers pasca Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Ke depan tantangan Dewan Pers harus terus menggelorakan dan meningkatkan pengetahuan wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan.

---

<sup>12</sup> Salah satu tugas Dewan Pers adalah memverifikasi (baik formal maupun material/faktual) media di Indonesia.

“Dewan Pers beserta semua pemangku kepentingan jurnalisme di Indonesia tentu akan mengevaluasi semua pelaksanaan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Kekurangan dan kelebihan akan menjadi bahan masukan dan program kerja Dewan Pers di masa mendatang,” jelas Agus Sudibyo.

Kekurangan ini pun disadari PWI. Dalam pandangan Suprpto, pelaksanaan rekrutmen peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku memang terkesan buru-buru karena memberikan informasi yang benar tentang pandemi covid-19 tidak bisa ditunda, karena semakin lama, informasi yang tidak benar tentang covid-19 kian luas beredar. “Media bertanggung jawab untuk segera meluruskan hal ini,” tegas Suprpto.

Ketiga, terdapat gradasi peran media sebagai watchdog dan the fourth estate of democracy. Harus diakui para peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tak mungkin menghasilkan berita investigasi yang merupakan ciri khas media sebagai watchdog dan the fourth estate of democracy. Berita yang diproduksi hanya sekedar memenuhi kewajiban sehingga mendapat bayaran penuh sebesar Rp1,6 juta untuk wartawan dan Rp3.000.000 untuk kurator per bulan. Di sisi lain, tidak mungkin peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku kritis terhadap kebijakan pemerintah yang sudah membayarnya melalui dana APBN. Apalagi untuk menghasilkan sebuah berita investigasi membutuhkan usaha yang keras, pengetahuan yang mendalam, dan waktu yang lama.

“Sejak awal AJI menolak program ini. AJI mengingatkan tentang kemungkinan munculnya conflict of interest pada peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini,” kata mantan Ketua Umum AJI, Abdul Manan.

Konflik kepentingan ini muncul karena Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku berada dalam dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, wartawan/media harus mengawasi jalannya kekuasaan (pemerintah/negara), tetapi di sisi yang berlawanan, kekuasaan memberikan uang untuk biaya liputan dan pemberitaan yang dipakai untuk mengawasinya.

AJI mengakui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah sebuah dilema. Karena kondisi luar biasa yang melanda dunia media dan jurnalisme ketika pandemi covid-19, AJI tidak bisa melarang anggotanya untuk tidak mengikuti Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini. AJI hanya bisa menghimbau anggotanya tidak menerima. Karena hanya himbauan bukan larangan, banyak anggota AJI yang mengikuti Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Padahal kalau kondisi normal, AJI pasti sudah mengeluarkan anggota yang menerima uang langsung dari negara.

“AJI mengharamkan uang langsung dari APBN,” kata Ketua Umum AJI, Sasmito Madrim. “Kalau kerja sama dengan lembaga negara, AJI tidak pernah berurusan dengan uangnya. AJI hanya konsentrasi pada programnya.”

Menurut Sasmito, bantuan melalui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini dikhawatirkan menghilangkan daya kritis wartawan. Keharusan atau tekanan untuk memuat berita (melalui rilis) akan menghilangkan independensi wartawan. Padahal independensi adalah nilai jurnalisme yang tidak bisa ditawar. Independensi atau bebas dari tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan adalah nyawa jurnalisme untuk tetap menjadi watchdog dan pilar keempat demokrasi.



Sasmito menyadari kondisi sulit media dan wartawan ketika pandemi covid-19. Oleh sebab itu, AJI memberi bantuan untuk wartawan yang terdampak pandemi covid-19. Bentuk bantuan itu bisa bantuan langsung (tunai) atau melalui fellowship. Sumber dana AJI berasal dari kas organisasi, dana sosial, dan bantuan dari forum wartawan teknologi (hasil kerja sama dengan berbagai institusi). AJI sangat hati-hati dan memverifikasi secara ketat organisasi yang memberikan bantuan. Kerja sama dengan lembaga negara atau institusi memiliki dua batasan. Pertama, sepanjang tidak melanggar kode etik dan kode perilaku organisasi.<sup>13</sup> Kedua, tidak mempengaruhi independensi pemberitaan.

“Uang APBN adalah dana negara. Uang negara adalah uang publik juga. Bukan sesuatu yang haram bagi media untuk menerima bantuan dari negara. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini,” tegas Agus Sudibyo.

Abdul Manan setuju dengan pendapat Agus Sudibyo tentang dana negara untuk wartawan dan media. Hanya saja Abdul Manan memberi garis tegas dan jelas tentang negara dan pemerintah.

“Yang harus dicatat adalah uang yang diberikan pemerintah sebagai kewajiban negara mengayomi warga negaranya, terutama di masa sulit seperti ini. Bukan berarti yang diberikan pemerintah kepada wartawan dan media dijadikan alat untuk meredam sikap kritis wartawan dan media. Sebaliknya, wartawan dan media pun jangan menjadikan bantuan sebagai beban untuk tidak mengkritik kekuasaan,” kata Abdul Manan.

Abdul Manan meneruskan bahwa uang dan fasilitas yang diberikan pemerintah bukan untuk membungkam wartawan dan media selama pandemi covid-19. Wartawan dan media harus tetap independen dari kekuasaan. Wartawan tetap harus mengutamakan objektivitas ketika membuat berita. Meski kondisi pandemi dan krisis, check and balance terhadap kekuasaan tetap harus berlangsung antara wartawan/media dan pemerintah/negara.

“Sejak awal penyelenggaraan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini permintaan Dewan Pers kepada pemerintah adalah tidak boleh ada syarat wartawan atau media tidak boleh mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Silakan saja tulis secara kritis selama sesuai dengan fakta di lapangan,” tandas Agus Sudibyo.

Keempat, motivasi untuk memperoleh insentif finansial. Seperti tujuan awal Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku untuk membantu wartawan yang kesulitan finansial selama pandemi covid-19, maka peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku pun hanya mengejar target 11 berita per bulan seperti yang sudah ditentukan. Tidak ada keinginan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku memproduksi berita yang secara kuantitas melebihi yang ditargetkan.

Selain AJI yang menghadapi dilema ketika pandemi covid-19, media di daerah dan wartawan di lapangan pun mengalami hal yang sama (Chelin Indra Sushmita dkk, 2021). Hanya saja dilemanya berbeda. Yaitu, perusahaan tidak menggajinya dengan layak (minimal dengan Upah Minimum Provinsi/UMP) dan keharusan tetap bertahan di tengah pandemi covid-19. Mengikuti Fellowship

---

<sup>13</sup> Selengkapny bisa dilihat di AD/ART AJI.  
[https://aji.or.id/upload/Dokumen/AD%20%26%20ART%20AJI%202021-2-26\\_.pdf](https://aji.or.id/upload/Dokumen/AD%20%26%20ART%20AJI%202021-2-26_.pdf). Diakses terakhir 30 November 2021 pukul 07.10 wib

Jurnalisme Perubahan Perilaku merupakan jalan keluarnya. Mendapat tambahan Rp1,6 juta per bulan adalah berkah yang tak terhitung. Rp1.600.000 juta per bulan merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran wartawan dan media yang berada di daerah.

“Penolakan amplop atau uang transport liputan seperti pada Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak memperhatikan kondisi media dan wartawan di daerah. Mungkin kalau di Ibu Kota dan media besar, uang transport bukan sesuatu yang penting. Tetapi bagi media dan wartawan di daerah, jelas sangat membantu,” kata Mohammad Hakim, salah satu wartawan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku asal Surabaya.

Mohammad Hakim melanjutkan seharusnya yang menolak bantuan negara dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku melihat kondisi media dan wartawan yang ada di daerah-daerah. Bertahan dalam kondisi normal saja sangat sulit apalagi ketika dihantam pandemi covid-19. Perusahaan harus mengeluarkan biaya operasional dan gaji wartawan sedangkan pemasukan dari iklan menurun drastis. Jumlah media yang kian menjamur (khususnya media online), menjadikan kue iklan semakin mengecil. Di tengah persaingan yang kian sengit, media kecil di daerah harus berdarah-darah untuk bertahan dan sekadar hidup.

“Makanya saya berharap fellowship semacam ini terus diadakan oleh Dewan Pers sebagai fasilitator dan pelindung pers. Selesai Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku, Dewan pers mengadakan fellowship lain seperti tentang hak azasi manusia, perlindungan kekerasan seksual, kebebasan pers, dan sebagainya” ujarnya. “Dengan fellowship minimal bisa meringankan beban perusahaan untuk menggaji wartawan. Dengan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku wartawan mendapat tambahan penghasilan.”

Hakim mengakui bahwa bersikap kritis terhadap negara tetap harus diusung media, sebab fungsi media sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi. Tetapi sikap kritis bukan berarti tidak boleh menerima uang dari negara. Bersikap kritis kepada negara/pemerintah tidak selalu dalam konteks pandemi covid-19. Masih banyak aspek dan kebijakan negara yang harus dikritisi media/wartawan.

“Saya banyak menulis berita kritis kepada negara/pemerintah di luar masalah pandemi covid-19. Banyak berita kritis yang disetorkan ke ubahlaku.id, tetapi tidak dimuat,” tambahnya.<sup>14</sup> “Tetapi kita juga tahu dirilah karena menerima dana dari negara. Tidak mungkin semua tulisan kita mengkritik kebijakan mereka.”

#### **D. CONCLUSIONS**

Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah jurnalisme (di era) krisis. Ia dihadirkan pemerintah secara insidental karena pandemi covid-19. Tujuannya untuk membantu keuangan wartawan yang terimbas krisis media. Jurnalisme krisis berisi kampanye dan promosi penanganan pandemi covid-19. Pers release dan kebijakan pemerintah dari pusat hingga daerah menjadi sumber utama jurnalisme krisis ini.

---

<sup>14</sup>ubahlaku.id adalah situs penampungan dan penyebaran semua berita yang dikirim wartawan yang mengikuti fellowship jurnalisme perubahan perilaku

Di sisi lain, Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku memunculkan aspek lain, yakni, krisis jurnalisme. Karya jurnalisme yang dihasilkan dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku tidak mencerminkan nilai dan prinsip jurnalisme. Nilai-nilai jurnalisme seperti independensi dan imparialitas, absen dalam produk Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Pemberian insentif/uang untuk wartawan dan kurator setiap bulannya adalah salah satu pemicunya. Dalam konteks ini, pandemi covid-19 menambah penyebab krisis jurnalisme yang pernah ada selain campur tangan elite politik, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, migrasi iklan ke e-commerce, kehadiran media sosial, dan perubahan budaya masyarakat.

Kehadiran atau bantuan pemerintah (dalam bentuk uang) kepada media dan wartawan merupakan investasi yang setiap saat bisa ditagih kepada media dan wartawan jika pemerintah membutuhkannya. Utang atau kebaikan pemerintah kepada media dan wartawan ketika pandemi covid-19 tidak berbeda dengan bantuan pemerintah ketika rezim Orde Baru.

Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini menjadikan daya cengkram kekuasaan kepada media di Indonesia semakin kuat atau kian hegemonik. Dengan demikian, nasib media ke depan kian mengesankan dan mengkhawatirkan. Setelah dikuasai politisi dan konglomerasi, kini melalui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku, media di Indonesia dikuasai negara.

Kajian Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis kajian ini berkontribusi pada pengembangan teori jurnalisme khususnya di masa krisis, relasi media, negara, dan demokrasi, serta human relations, jurnalisme, dan negara. Dalam situasi dan kondisi krisis, jurnalisme memiliki watak dan karakteristik sendiri. Ia berbeda ketika situasi normal. Pun, terdapat perbedaan antara krisis jurnalisme yang dipicu digitalisasi, krisis ekonomi negara, dan pandemi covid-19

Sedangkan pada tataran praktis kajian Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini memberikan pelajaran pada pengelolaan media ketika krisis, liputan wartawan ketika krisis, dan sikap pemerintah dalam membantu media dan wartawan keluar dari jeratan krisis. Meski kajian ini terbatas pada masa pandemi covid-19, tetapi akan menjadi pelajaran di masa depan jika kejadian serupa berulang.

Ke depan kajian Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini bisa diperluas dengan metode penelitian lain seperti analisis isi kuantitatif atau kualitatif untuk mengkaji semua produk jurnalisme Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Bisa juga dilakukan perbandingan fellowship jurnalisme yang diselenggarakan negara/pemerintah dengan lembaga swasta dan individu.

Penelitian tentang perbandingan respons dan bantuan negara kepada media dan wartawan di beberapa negara dalam pandemi covid-19 juga menarik dilakukan. Begitu juga kajian tentang perbandingan subsidi negara di era normal, crowdfunding, dan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini.

## REFERENCES

- Agustin, Racquel Garcia and Jaime Zeus Agustin. 2021. *Dominant Voices in the Time of a Global Disaster: Representation of Science in Online News*

- Reportage of The COVID-19 Pandemic*. SEARCH Journal of Media and Communication Research. Online ISSN: 2672-7080. SEARCH Journal 2021 SEARCH 13(1), 2021, 19-29. <http://search.taylors.edu.my>
- Althausser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara: (Catatan-Catatan Investigasi)*. Jakarta. IndoPROGRESS.
  - Arifuddin, Muhammad Thaufan. 2016. *Why Political Parties Colonize the Media in Indonesia*.
  - *An Exploration of Mediatization*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 20, Nomor 1, Juli 2016 (16-33) ISSN 1410-4946
  - Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
  - Armando, Ade. 2016. *Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global*. Jakarta. Kompas
  - Atmakusumah. 2009. *Tuntutan Zaman ; Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta. Spasi & VHR Book
  - Bernadas, Jan Michael Alexandre C, Karol Ilagan. 2020. *Journalism, Public Health, and COVID-19: Some Preliminary Insights from the Philippines*. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1329878X20953854>.  
<https://doi.org/10.1177/1329878X20953854>
  - Bossio, Diana. 2017. *Journalism and Social Media; Practitioners, Organisations, and Institutions*. Switzerland. Palgrave Macmilan
  - Cage, Julia. 2016. *Saving Media; Capitalism, Crowdfunding, and Democracy*. Cambridge, Massachusetts London, England. The Belknap Press Of Harvard University Press
  - Cahyadi, Firdaus. 2011. *Konglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika*. Jakarta. Knowledge Department, One World Indonesia
  - Chomsky, Noam, 1989. *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies*. Montréal. CBC Enterprises,
  - Chukwuma, Okechukwu. 2017. *Influence of the New Media on the Watchdog Role of the Press in Nigeria*. [https://www.researchgate.net/publication/330096144\\_Influence\\_of\\_the\\_New\\_Media\\_on\\_the\\_Watchdog\\_Role\\_of\\_the\\_Press\\_in\\_Nigeria](https://www.researchgate.net/publication/330096144_Influence_of_the_New_Media_on_the_Watchdog_Role_of_the_Press_in_Nigeria). DOI: 10.19044/esj.2017.v13n2p126
  - Curran, James. 2002. *Media and Power*. London. Routledge
  - Devereux, Eoin. 2003. *Understanding the Media*. London. Routledge
  - Estella, Pauline Gidget. 2020. *Journalism Competence and the COVID-19 Crisis in Southeast Asia Toward Journalism as a Transformative and Interdisciplinary Enterprise*. Pacific Journalism Review. <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/1132>
  - Fahlen, Matilda. 2016. *The future of Independent Journalism* Seminar on Media and Journalism, 2<sup>nd</sup> Semester 2016. [https://www.researchgate.net/publication/340385172\\_The\\_future\\_of\\_inde](https://www.researchgate.net/publication/340385172_The_future_of_inde)

pendent\_journalism\_-\_student\_essay\_at\_ISCTE\_-\_

\_part\_of\_masters\_program\_through\_Erasmus\_exchange

- Ferreira, Gil Baptista and Susana Borges . 2020. *Media and Misinformation in Times of COVID-19: How People Informed Themselves in the Days Following the Portuguese Declaration of the State of Emergency*. Journalism and Media. <https://www.mdpi.com/2673-5172/1/1/8>
- Fuller, Jack. 2010. *What is Happening to News*. Chicago. Chicago Press
- Haryanto, Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital; Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Heinonen, Ari. 1999. *Journalism in the Age of Net; Changing Society, Changing Profession*. University of Tampere, Finland
- Hirst, Martin. 2011. *News 2.0 ; Can Journalism Survive the Internet?* Australia. Allen and Unwin
- Hooker, Claire , Julie Leask, and Catherine King. 2012. *Media Ethics and Disease Outbreaks* (book chapter) . This is a pre-copyedited, author-produced PDF of a book chapter published by Ashgate Publishing following peer review. The definitive publisher-authenticated version [Hooker, C., Leask, J., King, C. (2012), 'Media ethics and infectious disease', in Ethics and Security Aspects of Infectious Disease Control. Eds. Christian Enemark and Michael J. Selgelid, Farnham: Ashgate, 2012, pp. 161–178. Copyright © 2012], is available online at <http://www.ashgate.com/isbn/9781409422532> . Used by permission of the Publishers 2015
- Ishara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta. Kompas
- Jebril, Nael 2013. *Is Watchdog Journalism Satisfactory Journalism? A Cross-national Study of Public Satisfaction with Political Coverage*. Reuters Institute for the Study of Journalism
- Kari Karppinen & Hallvard Moe (2016) *What We Talk About When Talk About "Media Independence"*, Javnost - The Public, 23:2, 105-119, DOI: 10.1080/13183222.2016.1162986
- Kovach, Bill and Tom Rosenstiel. 2007. *The Elements of Journalism*. New York, Amerika Serikat : Three Rivers Press.
- ----- 2010. *Blur : Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*. Penerjemah Imam Shofwan dan Arif Gunawan Sulistiyono. Jakarta. Dewan Pers.
- López-García, X. Costa-Sánchez, C. Vizoso, Á. *Journalistic Fact-Checking of Information in Pandemic: Stakeholders, Hoaxes, and Strategies to Fight Disinformation during the COVID-19 Crisis in Spain*. Int. J. Environ. Res Public Health 2021, 18, 1227. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031227>

- Lowrey, Wilson and Peter J. Gade (ed). 2011. *Changing The News ; The Forces Shaping Journalism in Uncertain Times*. London. Routledge.
- Lim, Merlyna. 2012. *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Participatory Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States & The Ford Foundation
- Macleod, Hugh. 2021. *COVID-19 and the Media: A Pandemic of Paradoxes* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3852816](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3852816)
- Márquez-Ramírez, Mireya, etc. 2019. *Detached or Interventionist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countries*. The International Journal of Press/Politics 2020, Vol. 25(1) 53– 75 [sagepub.com/journals-permissions](https://www.sagepub.com/journals-permissions) DOI: 10.1177/1940161219872155
- Maras, Steven. 2013. *Objektivty in Jurnalism*. Cambridge : Polity Press
- Martin, Fiona, and Tim Dwyer. 2019. *Sharing News Online; Commendary Cultures and Social Media News Ecologies*. Switzerland. Palgrave Macmilan
- Masha, Nasihin. 2020. *Jungkir Balik Pers; Masa Depan Pers dalam Pergumuan Internet of Things dan Konglomerasi Media*. Jakarta. Republika.
- Newman, Nic, William H. Dutton, and Grant Blank. 2012. *Social Media in the Changing Ecology of News: The Fourth and Fifth Estates in Britain*. International Journal of Internet Science 2012, 7 (1), 6–22 ISSN 1662-5544 IJIS.NET. [https://www.ijis.net/ijis7\\_1/ijis7\\_1\\_newman\\_et\\_al.pdf](https://www.ijis.net/ijis7_1/ijis7_1_newman_et_al.pdf)
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, and Shita Laksmi. 2012. *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance. Jakarta. [www.cipg.co.id](http://www.cipg.co.id)
- Nur Asiyah, Dewi 2021
- Pavlik, John V.2021. *Engaging Journalism: News in the Time of the COVID-19 Pandemic*. SEARCH Journal of Media and Communication Research. Online ISSN: 2672-7080. SEARCH Journal 2021SEARCH 13(1), 2021, 1-17. <http://search.taylors.edu.my>
- Parahita, Gilang Hesti. 2020. *Lima Dimensi dalam Jurnalisme Krisis Covid-19 dalam Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*. Editor Wawan Mas'udi and Poppy. S. Winanti. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. page.321-433
- Parahita, Gilang Desti. 2021. *The COVID-19 Pandemic Resilience of Indonesian Journalists*. Pacific Journalism Review . <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/1191>
- Perloff, Richard M. 2020. *The Dynamics of News; Journalism in the 21<sup>st</sup> Century Media Milieu*. London and New York. Routledge
- Perreault, Mildred F and Gregory P. Perreault.2021. *Journalists on COVID-19 Journalism: Communication Ecology of Pandemic Reporting*. American

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002764221992813>.  
<https://doi.org/10.1177/0002764221992813>

- Piliang, Yasraf Amir. 2010. *Post-realitas; Realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika*. Cetakan III. Yogyakarta. Jalasutra
- ----- 2011. *Dunia yang Dilipat*. Cetakan 1. Bandung. Matahari.
- Posetti, Julie etc, 2020. *Journalism, 'Fake News' & Disinformation*. [http://www.unesco.or.id/publication/UNESCO\\_Journalism\\_FakeNews\\_Disinformation\\_Handbook\\_For\\_Journalism\\_Education\\_2018\\_Printer\\_Friendly.pdf](http://www.unesco.or.id/publication/UNESCO_Journalism_FakeNews_Disinformation_Handbook_For_Journalism_Education_2018_Printer_Friendly.pdf)
- Ranjan, Prabhat and Sindhuja. 2014. *Media as the Fourth Estate of Democracy*. <https://libgen.ggwz.net/book/71699472/0cf81f>
- Ripollés, Andreu Casero. 2020. *Impact of COVID-19 on the Media System. Communicative and Democratic Consequences of News Consumption during the Outbreak*. DOI: 10.3145/epi.2020.mar.23
- Salman, Ali. 2021. *Media Dependency, Interpersonal Communication and Panic during the COVID-19 Movement Control Order*. SEARCH Journal of Media and Communication Research Online ISSN: 2672-7080 SEARCH Journal 2021 SEARCH 13(1), 2021, 79-92 <http://search.taylors.edu.my>
- Şen, A. F. (2021). *Watchdog Journalism during the Coronavirus Crisis in Turkey*. *Advances in Applied Sociology*, 11, 500-512. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.1110044>
- Schoemacher, Pamela J and Stephen D. Reese. 2014. *Mediating the Message : Theories of Influences on Mass Media Content*. Third Edition. New York. Routledge
- Schultz, Julianne. 1998. *Reviving The Fourth Estate*. United Kingdom. Cambridge University Press
- Siapara, Eugenia. 2012. 2012. *Understanding New Media*. California. USA : Sage Publications.
- SK, Ishadi. 2014. *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Supadiyanto. 2020. *(Opportunities) Death of Newspaper Industry in Digital Age and Covid-19 Pandemic*. *Jurnal The Messenger*, Vol. 12, No. 2, July 2020, pp. 192-207 P-ISSN: 2086-1559, E-ISSN: 2527-2810. DOI: 10.26623/themessenger.v12i2.2244
- Sushmita, C.I., Pawito, and Rahmanto A.N. 2021. *Covid-19 and Journalism Conundrums: A Study on Dilemmas in Content Selection*. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2). doi: 10.25139/jsk.v5i2.287



- Syahputra, Iswandi etc. 2021. *Pandemic Politics and Communication Crisis: How Social Media Buzzers Impaired the Lockdown Aspiration in Indonesia*. SEARCH Journal of Media and Communication Research Online ISSN: 2672-7080. SEARCH Journal 2021 SEARCH 13(1), 2021, 31-46. <http://search.taylors.edu.my>
- Syarwi. 2008. *Paradoks Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 12 Nomor 2. November. ISSN1410-4946 (121-256)
- Tshabangu, Thulani and Abiodun Salawu. 2021. *An Evaluation of Constructive Journalism in Zimbabwe: A Case Study of The Herald 's Coverage of the Coronavirus Pandemic*. Journal of African Media Studies. September 2021. DOI: 10.1386/jams\_00060\_1
- Utomo, Wisnu. Prasetya. 2020. *Jurnalisme Krisis dan Krisis Jurnalisme di Era Covid-19 dalam Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*. Editor Wawan Mas'udi and Poppy. S. Winanti. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press . page.300-320
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Star to Finish*. New York, London Guilford Press



Lampiran I  
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.  
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :  
Direktur Jenderal HKI  
melalui Direktur Hak Cipta,  
Desain Industri, Desain Tata Letak,  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
di  
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I.

Pencipta :

1. Nama

:

Dudi Iskandar

2. Kewarganegaraan

:

Indonesia

3. Alamat

:

Puri Bintaro Hijau Blok F8-8 Pondok Aren Tangerang Selatan

4. Telepon

:

081388143580

5. No. HP & E-mail

:

dudi.iskandar@budiluhur.ac.id

I.

Pencipta :

1. Nama

:

Geri Suratno

2. Kewarganegaraan

:

Indonesia

3. Alamat

:

Jalan Karyawan III RT 001/009 Jarang Tengah Kota tangerang

4. Telepon

:

081332208123

5. No. HP & E-mail

:

geri.curatno@budiluhur.ac.id

II.

Pemegang Hak Cipta :

1.Nama

:

DRPM Universitas Budi Luhur

2. Kewarganegaraan

:

3. Alamat

:

Jalan Raya Ciledug Petukangan Utara, Kebayoran Bau, Jaksel 12260

4. Telepon

:

021-5853753

5. No. HP & E-mail

:

hki@budiluhur.ac.id

III.

Kuasa :

1. Nama

:

2. Kewarganegaraan

:

3. Alamat

:

4. Telepon

:

5. No. HP & E-mail

:

IV.

Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan

:

V.

Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indo-

## VI Uraian ciptaan

: Pandemi covid-19 menyebabkan krisis di semua aspek kehidupan, termasuk pada ranah media dan jurnalisme. Banyak media yang mati karena kesulitan biaya operasional. Pun, tidak sedikit wartawan yang kehilangan pekerjaannya. Fakta inilah yang menjadi dasar pemerintah melalui Dewan Pers-Satgas Penanganan Covid-19 menggulirkan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pola, menganalisis aktivitas, dan memprediksi hubungan antara media dan negara pasca-Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus tipe tunggal holistik. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memotret konteks yang dinamis. Sedangkan studi kasus adalah metode untuk merekam sebuah peristiwa yang memiliki ukuran ruang dan waktu tertentu. Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku dilaksanakan Agustus-Desember 2021 yang melibatkan 7.276 wartawan dari 857 media (cetak, televisi, radio, dan daring) dan 26 kurator. Jumlah berita yang berhasil diproduksi sebanyak 288 607 buah. Jumlah berita itu terdiri dari 59.375 berita televisi, 7.314 berita radio, 140.493 berita media daring, dan 80.455 berita media cetak. Penelitian ini menemukan selama Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku jurnalisme mengalami krisis, kehilangan fungsinya sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Pemberian uang tunai kepada wartawan dan kurator selama fellowship menjadikan jurnalisme kehilangan independensinya. Untuk merevitalisasi fungsi pers, pasca pandemi covid-19, jurnalisme dan media harus melepaskan diri dari kekuasaan, konglomerasi, dan kepentingan politik sesaat. Hanya dengan inilah jurnalisme berada di nilai kesejatiaannya dan kokoh sebagai penyuara kepentingan publik.

**Keywords :** *jurnalisme krisis; krisis jurnalisme; pandemi covid-19; fellowship jurnalisme perubahan perilaku*

Jakarta, 20 Juli 2022



Tanda Tangan :

Nama Lengkap : Dudi Iskandar



Tanda Tangan :

Nama Lengkap : Geri Suratno

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dudi Iskandar

Alamat : Puri Bintaro Hijau Blok F8-8 Pondok Aren Tangerang Selatan

N a m a : Geri Suratno

Alamat : Jalan Karyawan III RT 001/009 Karang Tengah Kota Tangerang

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : DRPM Universitas Budi Luhur

Alamat : Jalan Raya Ciledug Petukangan Utara, Kebayoran Baru, Jaksel 1220

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa karya Ilmiah berjudul **KEBIJAKAN STRATEGIS NEGARA DI BIDANG MEDIA DAN PRAKTIK JURNALISTIK DI ERA PANDEMIK COVID-19**

untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juli 2022

Pemegang Hak Cipta

( Dr. Krisna Adiyarta M. M.Sc )



( Dudi Iskandar )



( Geri Suratno )



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dudi Iskandar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Puri Bintaro Hijau Blok F8-8 Pondok Aren Tangerang Selatan  
N a m a : Geri Suratno  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Karyawan III RT 001/009 Karang Tengah Kota Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya cipta yang saya mohonkan :

Berupa : Karya Ilmiah

Berjudul : Kebijakan Strategis Negara dalam Bidang Media dan Praktik Jurnalisme di Era Covid-19

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :
- a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali;  
Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juli 2022

Yar



(Dudi Iskandar)



(Geri Suratno)